

SISTEM
AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP)



LAPORAN KINERJA

Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan

TAHUN
2023



STASIUN PSDKP TARAKAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN

#2024
KKP BEYOND

Kata Pengantar

Puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja (Lkj) Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2023 dapat terselesaikan. Pelaksanaan kegiatan pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) selama Tahun 2023 telah diwarnai oleh sejumlah keberhasilan yang dicerminkan dengan pencapaian indikator kinerja sasaran sesuai target. Namun masih ada sasaran kinerja yang belum memenuhi target karena belum dilaksanakan. Informasi kinerja tersebut disajikan dalam sebuah Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2023 Unit Pelaksana Teknis Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan (UPT Stasiun PSDKP Tarakan).

Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi, misi yang dibebankan kepada UPT Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2023. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih (*good governance and clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan.

Kami berharap, Laporan ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja sekaligus tolak ukur peningkatan kinerja bagi seluruh pegawai UPT Stasiun PSDKP Tarakan dan semua pihak yang terkait. Semoga motivasi yang telah tumbuh dan kerjasama yang telah dibangun dalam membangun kinerja pengawasan SDKP dapat terus ditingkatkan.

Tarakan, 18 Januari 2024

Kepala Stasiun PSDKP Tarakan



Johanis J. Medea

Ringkasan Eksekutif

Stasiun PSDKP Tarakan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ditetapkan per tahun berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan. Pada tahun 2023, Stasiun PSDKP Tarakan memiliki 10 (Sepuluh) Sasaran Kegiatan dengan 28 (dua puluh delapan) Indikator Kinerja yang kemudian diturunkan lagi menjadi kegiatan. Pada Tahun 2023, Stasiun PSDKP Tarakan telah melaksanakan seluruh Indikator Kinerja tersebut.



Pada tahun 2023 pagu anggaran Stasiun PSDKP Tarakan ditetapkan sebesar Rp.25,680,302,000. Realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp.25,583,370,144 atau 99.62% dari total pagu anggaran.

Daftar Isi

Daftar Tabel

Tabel 1. Hubungan Sebab-Akibat Sasaran Strategis KKP tahun 2020-2024 dan Sasaran Program Ditjen PSDKP tahun 2020-2024	15
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2023	18
Tabel 3. Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2023	22
Tabel 4. Hasil Pengukuran IKU Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen kelautan (%).....	26
Tabel 5. Perbandingan Pencapaian IKU ke-1 dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2023.....	26
Tabel 6. Tahapan pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Tarakan	28
Tabel 7. Capaian Jumlah Output Nilai Kualitas Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Pemanfaat Sumber Daya Kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan	28
Tabel 8. Hasil Pengukuran IKU Nilai Kualitas Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Pemanfaat Sumber Daya Kelautan (Nilai)	29
Tabel 9. Perbandingan Pencapaian IKU ke-2 dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2023.....	30
Tabel 10. Hasil Pengukuran IKU Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen perikanan (%)	33
Tabel 11. Perbandingan Pencapaian IKU ke-3 dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2023	33
Tabel 12. Tahapan pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Stasiun PSDKP Tarakan	35
Tabel 13. Capaian Jumlah Output Nilai Kualitas Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Pemanfaat Sumber Daya Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan	35
Tabel 14. Hasil Pengukuran IKU Nilai Kualitas Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Pemanfaat Sumber Daya Perikanan (Nilai)	36
Tabel 15. Perbandingan Pencapaian IKU ke-4 dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2023	37

Daftar Gambar

Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Tarakan	10
Gambar 2. Wilayah Kerja Stasiun PSDKP Tarakan	11
Gambar 3. Sasaran Kegiatan Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2023	18

Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Dalam konteks pembangunan kelautan dan perikanan, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) berperan dalam penegakan hukum dan peraturan perundangan-undangan di bidang kelautan dan perikanan guna menjamin terselenggaranya pemanfaatan dan pengelolaan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab. Peran tersebut di implementasikan melalui pelaksanaan program/kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan melalui terwujudnya kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja (LKj) Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2023 merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah diseminasi informasi capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. LKj ini menginformasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus Stasiun PSDKP Tarakan untuk mencapai target kinerja yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana aturan tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan perannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam rangka menuju perwujudan "good governance".

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2023 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka

mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP setiap tahun anggaran kepada masyarakat dan stakeholders lainnya.

Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja Stasiun PSDKP Tarakan pada setiap tahun dan memperbaiki kinerja untuk setiap tahun berikutnya, yang dimulai dari proses perencanaan secara benar, pelaksanaan dan evaluasinya. Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi yang dilakukan pada setiap tri wulan dan tahunan, akan dirumuskan beberapa rekomendasi sebagai masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pencapaian target yang lebih baik di tri wulan dan tahun berikutnya.

C. Data Umum Organisasi

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan (Stasiun PSDKP Tarakan) merupakan salah satu dari 14 (empat belas) Unit Pelaksana Teknis (UPT) didalam lingkup Ditjen PSKP yang terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor. 33/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor. 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan peraturan tersebut disebutkan bahwa tugas Stasiun PSDKP Tarakan adalah melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Didalam melaksanakan tugasnya, Stasiun PSDKP Tarakan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan bimbingan kepada kelompok masyarakat pengawas;
- d. Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan kapal pengawas perikanan;
- e. Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- f. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

2. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi (TUSI) organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/ Permen-KP/ 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, maka dalam menjalankan tugasnya Kepala Stasiun membawahi Kepala Urusan Umum, Pelaksana Koordinasi Kelompok Sarana dan Prasarana Pengawasan, dan Pelaksana Koordinasi Kelompok Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran, Jabatan Fungsional dan Satuan Pengawasan dimana masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan seperti diuraikan dibawah ini :

a. Kepala Stasiun

Kepala Stasiun PSDKP Tarakan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal PSDKP yang mempunyai tanggungjawab untuk merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial dibidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan di lingkungan Stasiun PSDKP Tarakan untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.

b. Kepala Urusan Umum

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pengelolaan urusan administrasi keuangan, barang kekayaan milik negara, kepegawaian, dan jabatan fungsional, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.

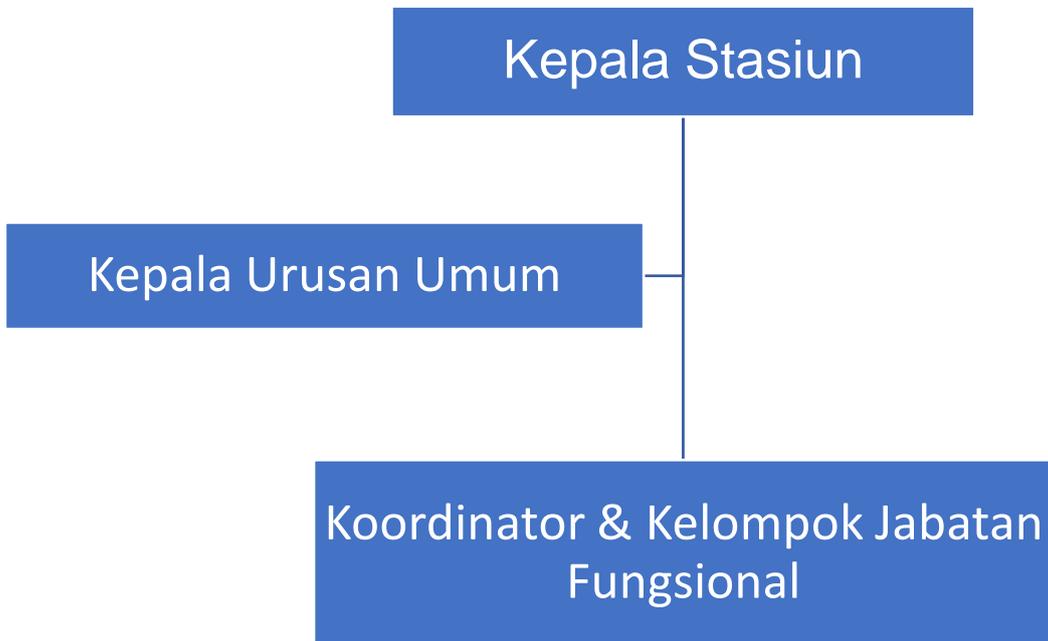
c. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas melaksanakan kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta kegiatan lain sesuai dengan tugas jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan untuk fungsional lainnya disesuaikan dengan bidang tugas fungsional yang diembannya berdasarkan SK fungsional yang telah ditetapkan.

d. Satuan Pengawasan SDKP

Melaksanakan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pembinaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) serta evaluasi, dokumentasi, informasi dan pelaporan dibidang pengawasan dan penanganan pelanggaran sumber

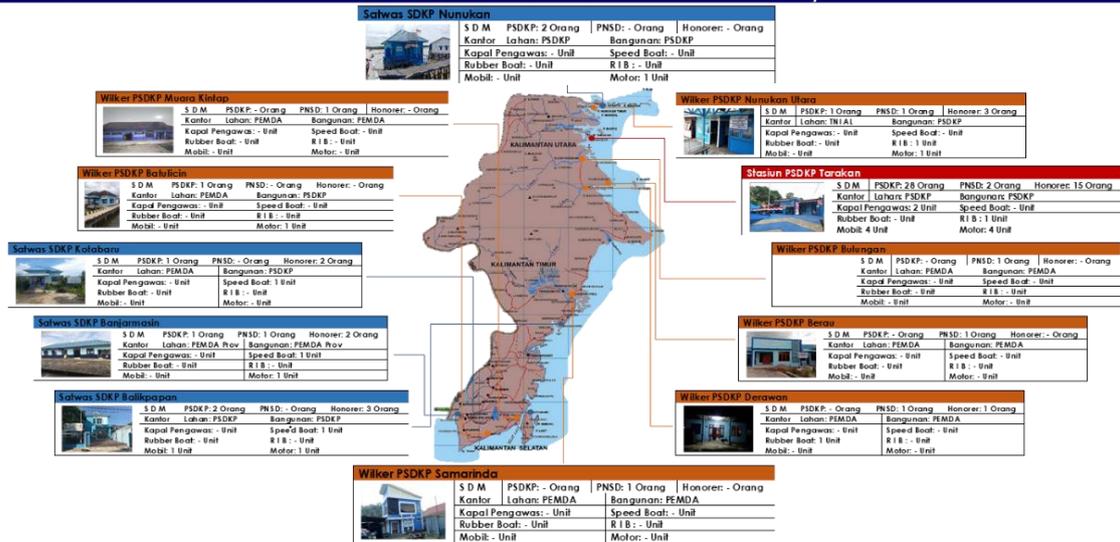
daya kelautan dan perikanan diwilayah kerja masing - masing dan dipimpin oleh seorang Koordinator. Untuk mendukung terlaksananya kegiatan pengawasan SDKP secara baik sampai ke daerah, maka telah dibentuk Satuan Pengawasan SDKP dan Wilker dibawah koordinasi UPT Stasiun Pengawasan SDKP Tarakan meliputi 4 (Empat) Satuan Pengawasan (Satwas) dan 10 (Sepuluh) Wilayah Kerja (Wilker) sebagai mana Struktur Organisasi pada gambar dibawah ini:



Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun PSDKP Tarakan

WILAYAH KERJA STASIUN PSDKP TARAKAN

(Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan)



Gambar 2. Wilayah Kerja Stasiun PSDKP Tarakan

D. Isu Strategis

Isu aktual yang menjadi tantangan bagi Stasiun PSDKP Tarakan saat ini yaitu:

- Masih maraknya kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang dan tidak ramah lingkungan berupa, penggunaan pukat hela atau trawl, bom ikan dan bus di perairan pulau Derawan dan sekitarnya, serta penyetruman ikan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Walaupun penangkapan dan perdagangan kepiting bertelur untuk pasar ekspor telah dilarang, namun masih banyak pelanggaran terhadap aktifitas tersebut;
- Kapal perikanan dibawah 10 GT masih banyak yang tidak melengkapi dan memperpanjang surat-surat kapalnya ketika beroperasi sehingga masih ditemukan pelanggaran dilapangan saat dilakukan operasi pengawasan;
- Jumlah SDM di Stasiun PSDKP Tarakan yang masih kurang baik pegawai fungsional pengawas perikanan maupun pegawai fungsional umum. Selain itu, perlunya peningkatan kompetensi SDM yang tersedia melalui pelatihan dan bimbingan teknis.

E. Sistematika Penyajian Laporan

Secara garis besar sistematika penyajian LKj Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2023 diuraikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan SDKP dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2023

Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasikan perbaikan kinerja di Triwulan berikutnya.

Bab II

Perencanaan Kinerja

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tarakan berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdiri dari: Rencana Strategis Ditjen PSDKP Tahun 2020-2024; Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2023.

A. Rencana Strategis Ditjen PSDKP Tahun 2020 – 2024

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PSDKP 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024. Renstra tersebut juga disusun dengan menggunakan berbagai asumsi serta kombinasi pendekatan bottom up dan top down dengan keterlibatan Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV lingkup Ditjen PSDKP. Pendekatan top down mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan bottom up dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Renstra Ditjen PSDKP ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor 23A/KEP-DJPSDKP/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 - 2024. Perubahan ini tentunya untuk dapat menyelaraskan dengan visi, misi dan arah kebijakan KKP. Secara ringkas substansi Renstra Ditjen PSDKP hasil revisi diuraikan sebagai berikut:

1. Pernyataan Visi dan Misi

Dalam rangka memberikan arah pandangan kedepan terkait dengan kinerja dan peranan Ditjen PSDKP serta untuk memberikan gambaran tentang kondisi masa depan yang ingin diwujudkan oleh Ditjen PSDKP, maka dirumuskan visi Ditjen PSDKP yang mencerminkan keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan.

Visi :

“Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab menuju terwujudnya visi Kementerian Kelautan dan Perikanan”

Sejalan dengan visi Ditjen PSDKP, diperlukan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang mencerminkan apa yang akan dapat dicapai (pada level dampak) dan bagaimana mencapainya dalam periode tertentu, beserta ukuran-ukuran pencapaiannya. Misi yang dirumuskan menggambarkan tindakan atau upaya sesuai dengan tugas dan fungsi Ditjen PSDKP.

Misi :

- a. Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi;
- b. Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan;
- c. Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggung jawab;
- d. Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup Ditjen PSDKP.

1. Tujuan Strategis

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 s/d 5 tahun. Perumusan tujuan menggambarkan hasil-hasil serta manfaat yang akan diberikan oleh Ditjen PSDKP. Tujuan yang dimaksud adalah Tujuan KKP tahun 2020-2024 yang terkait dengan dan didukung oleh pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen PSDKP, yaitu dirumuskan sebagai berikut:

Tujuan Strategis:

- a. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan melalui meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan terutama berkaitan dengan

- peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional melalui meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - c. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui optimalnya pengelolaan kawasan konservasi perairan dan optimalnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP melalui peningkatan tata kelola pemerintahan lingkup Ditjen PSDKP.

2. Sasaran Strategis

Berdasarkan Tujuan Ditjen PSDKP tahun 2020-2024 tersebut maka disusunlah Sasaran Ditjen PSDKP tahun 2020-2024 yang dirumuskan dari Sasaran Strategis KKP tahun 2020-2024. Sasaran Strategis KKP tahun 2020-2024 adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh KKP pada tahun 2020-2024 yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome) dari satu atau beberapa Program yang berupa Sasaran Program. Dengan kata lain, Sasaran Strategis dapat terwujud sebagai akibat dari tercapainya satu atau beberapa Sasaran Program. Ditjen PSDKP sebagai unit kerja Eselon I lingkup KKP yang mendukung tercapainya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi KKP tahun 2020-2024 maka merumuskan Sasaran Program Ditjen PSDKP tahun 2020-2024 sebagaimana dijabarkan pada Tabel dibawah ini:

Tabel 1. Hubungan Sebab-Akibat Sasaran Strategis KKP tahun 2020-2024 dan Sasaran Program Ditjen PSDKP tahun 2020-2024

No.	Sasaran Strategis KKP (Akibat)	Sasaran Program Ditjen PSDKP (Sebab)	Keterangan
SS-6	Tatakelola SDKP bertanggung jawab	Partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP ikut berkontribusi menciptakan tata kelola SDKP yang bertanggung jawab
		Kepatuhan pemangku kepentingan KP meningkat	Meningkatnya kepatuhan pemangku kepentingan KP ikut berkontribusi menciptakan tatakelola SDKP yang bertanggungjawab

No.	Sasaran Strategis KKP (Akibat)	Sasaran Program Ditjen PSDKP (Sebab)	Keterangan
SS-8	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang Integratif	Pemantauan dan Operasi Armada efektif	Efektifnya pemantauan dan operasi armada ikut berkontribusi menciptakan pengawasan SDKP yang integratif
		Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan tuntas	Tuntasnya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan ikut berkontribusi menciptakan pengawasan SDKP yang integratif
SS-9	Tata kelola pemerintahan yang baik	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	Baiknya Tata kelola pemerintahan lingkup Ditjen PSDKP ikut berkontribusi menciptakan tatakelola pemerintahan yang baik pada lingkup KKP

B. Rencana Strategis Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2020-2024

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2020-2024 menitik beratkan kegiatan operasional pengawasan yaitu memadu serasikan kebijakan pusat dan Stasiun PSDKP Tarakan adalah pemfokusan kegiatan pengawasan kepada pemanfaatan dan perlindungan sumberdaya kelautan dan perikanan untuk mewujudkan visi dan misi Ditjen PSDKP.

Adapun visi dan misi Stasiun PSDKP Tarakan mengacu pada visi dan misi Ditjen PSDKP, yang dijabarkan oleh Stasiun PSDKP Tarakan melalui tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan : Melakukan pengawasan dalam pengelolaan sumber daya kelautan perikanan secara berkelanjutan di wilayah kerja Stasiun PSDKP Tarakan.

Sasaran : Wilayah kerja Stasiun PSDKP Tarakan bebas dari kegiatan illegal fishing serta kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan.

C. Rencana Kerja Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2023

1. Program

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisikan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Program kerja Stasiun PSDKP Tarakan 2023 yaitu: Program Pengawasan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan.

2. Kegiatan

Rumusan kegiatan tingkat Stasiun PSDKP Tarakan, yang merupakan turunan dari fungsi eselon II Ditjen PSDKP, meliputi:

- a. Kegiatan Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan;
- b. Kegiatan Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan;
- c. Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan;
- d. Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan; dan
- e. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: (1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; (2) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (3) Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Stasiun PSDKP Tarakan telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2023 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsinya serta menyempurnakannya melalui penerapan sistem pengelolaan kinerja berbasis BSC. Implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja di lingkungan Stasiun PSDKP Tarakan, selain merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh KKP, juga ditujukan untuk:

1. Menerjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi;
2. Membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (continuous improvement);
3. Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi.

BSC Stasiun PSDKP Tarakan menggunakan 3 (tiga) perspektif yaitu Customer Perspective, Internal Process Perspective, dan Learn and Growth Perspective dikarenakan Stasiun PSDKP Tarakan merupakan Unit Pelaksana Teknis sebagai unit kerja pendukung yang mengacu pada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagai

unit kerja utama. Sasaran Strategis hasil implementasi BSC Tahun 2023 dipetakan dalam Peta Sasaran Strategis pada gambar berikut:

No	Kode	Sasaran	Status	Aksi
1	SK1.1	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Kelautan	Digunakan	Edit
2	SK1.2	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha kelautan yang sesuai ketentuan	Digunakan	Edit
3	SK2.1	Tersedianya Data dan Informasi Intelijen Perikanan	Digunakan	Edit
4	SK2.2	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha perikanan yang sesuai ketentuan	Digunakan	Edit
5	SK3.1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat yang partisipatif	Digunakan	Edit
6	SK3.2	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	Digunakan	Edit
7	SK3.3	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	Digunakan	Edit
8	SK4.1	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan yang tertas	Digunakan	Edit
9	SK4.2	Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berkualitas	Digunakan	Edit
10	SK5.1	Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP	Digunakan	Edit

Gambar 3. Sasaran Kegiatan Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2023

Customers Perspective berisi ekspektasi dari customer dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. *Internal Process Perspective* berisi proses bisnis seperti apa yang harus dikelola untuk memberikan layanan dan nilai-nilai kepada stakeholder dan customer. Sedangkan *Learning and Growth Perspective* berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang dihasilkan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) berikut targetnya pada setiap Sasaran Strategis (SS) ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2023

N O	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Tersedianya data dan informasi intelijen kelautan	1. Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen kelautan (%)	80
2.	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha kelautan yang sesuai ketentuan	2. Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (nilai)	100
3.	Tersedianya data dan informasi intelijen perikanan	3. Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen perikanan (%)	80
4.	Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha perikanan yang sesuai ketentuan	4. Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan(nilai)	100

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
5.	Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat yang partisipatif	5. Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	80
6.	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif	6. Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	87,6
		7. Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (indeks)	87,6
		8. Persentase pemenuhan logistik kapal pengawasan SDKP (%)	100
7.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	9. Persentase sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	100
		10. Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (%)	100
8.	Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang tuntas	11. Indeks penerapan sanksi administrative bidang kelautan dan perikanan (indeks)	80
		12. Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan kapal sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)	80
		13. Indeks penyelesaian tindak lanjut penerapan sanksi administrative (indeks)	80
9.	Terselenggaranya tindak pidana kelautan dan perikanan yang berkualitas	14. Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan (indeks)	93
10.	Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP	15. Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) kapal perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (indeks)	80
		16. Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi hasil Penangkapan Ikan) Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (indeks)	80
		17. Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk Pembangunan unit kerja berpredikat menuju WBK Stasiun PSDKP Tarakan (nilai)	75

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		18. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%)	100
		19. Indeks profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (indeks)	78
		20. Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Tarakan (nilai)	80,5
		21. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (nilai)	21
		22. Inovasi yang diterapkan pada unit kerja Stasiun PSDKP Tarakan (inovasi)	1
		23. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%)	77,5
		24. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%)	77,5
		25. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%)	92
		26. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75
		27. Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (nilai)	93,75
		28. Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (nilai)	82

E. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023

Berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Ungkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam melakukan pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berjenjang dengan tahapan:

1. Melakukan perhitungan data mentah (Raw Data) Perhitungan data mentah, perhitungan atas objek yang diukur untuk memperoleh data realisasi IKU sesuai formula dalam manual IKU.

2. Menghitung realisasi IKU, Realisasi IKU merupakan hasil perhitungan data mentah berdasarkan formula dalam manual IKU, dengan memperhitungkan periode perhitungan IKU, dan pola perhitungan capaian.
3. Memasukan data realisasi IKU dan dokumen pendukungnya pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (kinerjaku.kkp.go.id).
4. Melakukan validasi data untuk memastikan bahwa data yang diinput valid, reliable, dan obyektif.
5. Menghitung capaian Nilai Kinerja Penpektif (NKP) dan Nilai Pencapaian Sasaran Stratesis (NPSS).
6. Menyesuaikan maksimum pencapaian. Nilai maksimum pencapaian adalah 120% (untuk menghindari KPI gaming).
7. Mengarsipkan data dan dokumen pendukung capaian kinerja.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja triwulanan didukung dengan implementasi Aplikasi "Kinerjaku" yang merupakan aplikasi Pengelolaan Kinerja berbasis informasi teknologi (dapat diakses di www.kinerjaku.kkp.go.id)

Bab III

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Pembangunan KP Bidang Pengawasan SDKP Tahun 2023

1. Capaian Kinerja Utama Stasiun PSDKP Tarakan TW III Tahun 2023

Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, berdasarkan implementasi BSC dalam pengelolaan kinerja, pada Tahun 2023 Stasiun PSDKP Tarakan telah menetapkan 10 (Sepuluh) Sasaran Kegiatan (SK) dengan 28 (Dua Puluh Delapan) Indikator Kinerja baik IKU (Indikator Kinerja Utama) maupun IKM (Indikator Kinerja Manajerial). Capaian kinerja Tahun 2023 ditabulasikan seperti tercantum dalam Tabel berikut:

Tabel 3. Capaian Kinerja Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN (%)
SK1.1 Tersedianya data dan informasi intelijen kelautan			
1. Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen kelautan (%)	80	100	120
SK1.2 Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha kelautan yang sesuai ketentuan			
2. Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya kelautan (nilai)	100	100	100
SK2.1 Tersedianya data dan informasi intelijen perikanan			
3. Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen perikanan (%)	80	100	120
SK2.2 Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha perikanan yang sesuai ketentuan			
4. Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan pemanfaat sumber daya perikanan (nilai)	100	100	100
SK3.1 Terselenggaranya pengawasan sistem berbasis masyarakat yang partisipatif			
5. Indeks kualitas pembinaan Pokmaswas (indeks)	80	100	120
SK3.2 Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif			
6. Indeks kinerja operasi kapal pengawas (indeks)	87,6	99,16	113,20
7. Indeks kinerja operasi speedboat pengawas (indeks)	87,6	98,93	112,93

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN (%)
8. Persentase pemenuhan logistik kapal pengawasan SDKP (%)	100	100	100
SK3.3 Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan			
9. Persentase sarana dan prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	100	100	100
10. Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP (%)	100	100	100
SK4.1 Terselenggaranya penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan yang tuntas			
11. Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (indeks)	80	100	120
12. Indeks pemeriksaan hasil analisis pemantauan kapal sumber daya kelautan dan perikanan (indeks)	80	100	120
13. Indeks penyelesaian tindak lanjut pengenaan sanksi administrative (indeks)	80	100	120
SK4.2 Terselenggaranya tindak pidana kelautan dan perikanan yang berkualitas			
14. Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan (indeks)	93	100	107,53
SK5.1 Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP			
15. Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) kapal perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (indeks)	80	92,04	115,05
16. Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi hasil Penangkapan Ikan) Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (indeks)	80	94,50	118,13
17. Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk Pembangunan unit kerja berpredikat menuju WBK Stasiun PSDKP Tarakan (nilai)	75	83,81	111,75
18. Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%)	100	100	100
19. Indeks profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (indeks)	78	89,06	114,18
20. Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Tarakan (nilai)	80,5	80,3	99,75
21. Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (nilai)	21	20,34	96,86

SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN (%)
22. Inovasi yang diterapkan pada unit kerja Stasiun PSDKP Tarakan (inovasi)	1	1	100
23. Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%)	77,5	100	120
24. Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%)	77,5	95,94	120
25. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%)	92	75,11	81,64
26. Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	75	100	120
27. Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (nilai)	93,75	93,24	99,46
28. Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (nilai)	82	85,87	104,72

Keterangan Warna :

Warna	Keterangan
Istimewa	Nilai 110 – 120
Baik	Nilai 90 - <110
Cukup	Nilai 70 - <90
Kurang	Nilai 50 - <70
Sangat Kurang	Nilai <50
Belum ada Penilaian	

Dalam pelaksanaan kegiatan di Tahun 2023, capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan sudah mencapai target yaitu 108,43% dengan predikat "Baik". Terdapat 15 (lima belas) IKU/IKM yang telah dilaksanakan dan melampaui target tahun 2023 dengan predikat istimewa (berwarna biru), 12 (dua belas) IKU/IKM yang telah dilaksanakan dan mencapai target tahun 2023 dengan predikat baik (berwarna hijau) serta terdapat 1 (satu) IKU/IKM yang telah dilaksanakan namun tidak mencapai target tahun 2023 dan hanya memperoleh predikat cukup (berwarna kuning).

B. Analisis Pencapaian Kinerja

Analisis terhadap pencapaian kinerja dilakukan pada setiap Sasaran Strategis di masing-masing Indikator Kinerja yang bertujuan untuk menjelaskan secara rinci jenis kegiatan yang mendukung tercapainya atau tidak tercapainya suatu kegiatan disertai dengan kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian target kinerja.

Pada periode TW IV Tahun 2023, Stasiun PSDKP Tarakan telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi dan analisis pada setiap Sasaran Kegiatan diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan 1:

Tersedianya data dan informasi intelijen kelautan

Untuk mencapai SK1 Tersedianya data dan informasi intelijen kelautan, sasaran strategis ini didukung oleh 1 IKU yaitu Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen kelautan (%). Penjabaran IKU tersebut dijelaskan sebagai berikut:

IKU 1 : Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen kelautan (%)

Intelijen ialah kegiatan yaitu segala usaha, tindakan dan kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Data dan informasi intelijen kelautan yaitu data dan informasi yang dikumpulkan oleh Polsus PWP3K atau pihak yang diberikan tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas intelijen terhadap dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan atau terkait isu yang memerlukan klarifikasi.

Penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen kelautan yaitu data intelijen yang sudah dalam bentuk produk atau bahan keterangan yang sudah dikumpulkan atau diolah yang selanjutnya disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan penyusunan rencana, kebijakan, dan pengambilan keputusan/ penindakan yang akan ditempuh.

Tabel 4. Hasil Pengukuran IKU Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen kelautan (%)

INDIKATOR KINERJA	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Renstra 2020-2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	
Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen kelautan (%)	-	-	-	-	-	-	100	100	-	

Berdasarkan tabel diatas Stasiun PSDKP Tarakan memperoleh capaian Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen kelautan dengan capaian 100% dan tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena merupakan indikator baru. Capaian kinerja tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan rencana strategis 2020-2024 karena perbedaan indikator. Capaian tersebut didukung oleh kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan yang dilaksanakan oleh Polsus PWP3K dan tindak lanjut atas aduan masyarakat atas dugaan pelanggaran. Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian IKU adalah SDM Polsus PWP3K yang kompeten dalam melaksanakan tugas dan pelaporan hasil kerja secara rutin sehingga terdokumentasi secara rutin. Secara umum kendala yang dihadapi pada proses pencapaian kinerja terkait IKU ini adalah keterbatasan anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan pengumpulan bahan dan keterangan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka dilakukan penyusunan rencana kegiatan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan tingkat kerawanan pelanggaran.

Tabel 5. Perbandingan Pencapaian IKU ke-1 dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2023

No.	UPT	Target 2023	Capaian2023	Persentase Capaian 2023
1	Stasiun PSDKP Tarakan	100	100	100
2	Stasiun PSDKP Biak	100	100	100
3	Stasiun PSDKP Ambon	100	100	100
4	Stasiun PSDKP Tahuna	100	100	100
5	Stasiun PSDKP Pontianak	100	100	100

No.	UPT	Target 2023	Capaian2023	Persentase Capaian 2023
6	Stasiun PSDKP Cilacap	100	100	100
7	Stasiun PSDKP Kupang	100	100	100
8	Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100

Secara umum capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan pada IKU Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Tarakan termasuk baik bila dibandingkan dengan UPT sejenis/setara dengan capaian tahunan sebesar 100%.

2. Sasaran Kegiatan 2:

Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha kelautan yang sesuai ketentuan

Pencapaian Sasaran Kegiatan "Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha kelautan yang sesuai ketentuan" diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu:

IKU 2 : Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Kelautan (Nilai)

Penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha bidang kelautan adalah upaya pengawasan usaha kelautan oleh Polsus PWP3K dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha kelautan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaporan hasil pengawasan

Pemeriksaan pelaku usaha kelautan meliputi pelaku usaha kapal kelautan (penangkapan dan/atau pengangkutan), pelaku usaha pembudidayaan ikan, pelaku usaha pengolahan ikan, pelaku usaha pemasaran dan distribusi hasil kelautan.

Nilai kualitas penyelesaian pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan merupakan penjumlahan dari nilai penyelesaian tahapan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya kelautan.

Untuk mengukur IKU ini dilakukan dengan tahapan pemeriksaan oleh Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K terhadap 1 (satu) pelaku usaha dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 6. Tahapan pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha kelautan lingkup Stasiun PSDKP Tarakan

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	Persiapan	10	SPT, Surat Pemberitahuan, Daftar Pertanyaan
2	Pemeriksaan kesesuaian kegiatan usaha dengan peraturan perundang-undangan	70	Berita Acara Pengawasan (form BAP PPSDK)
3	Pelaporan	20	Laporan hasil pemeriksaan
Jumlah Nilai		100	

Rincian hasil capaian IKU Persentase Penyelesaian Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan disajikan didalam tabel dibawah ini.

Tabel 7. Capaian Jumlah Output Nilai Kualitas Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Pemanfaat Sumber Daya Kelautan Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Nilai
1	Jumlah Pelaku Usaha Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang Diperiksa Kepatuhannya	4	6	100
2	Jumlah Pelaku Usaha Pemanfaatan Produk dan Jasa Kelautan yang Diperiksa Kepatuhannya	6	7	100
3	Jumlah Pelaku Usaha Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Diperiksa Kepatuhannya	6	6	100
4	Jumlah Pelaku Usaha Pengelolaan Ruang Laut yang Diperiksa Kepatuhannya	3	4	100
5	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan dan Non Perikanan yang Diperiksa Kepatuhannya dalam Pengelolaan Limbah yang Berdampak pada Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya	8	11	100
6	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan yang Diawasi dari Kegiatan Destructive Fishing	40	49	100
TOTAL		67	83	100

Tabel 8. Hasil Pengukuran IKU Nilai Kualitas Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Pemanfaat Sumber Daya Kelautan (Nilai)

INDIKATOR KINERJA	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Renstra 2020-2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	
Nilai Kualitas Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Pemanfaat Sumber Daya Kelautan (Nilai)	-	-	-	-	-	-	100	100	-	

Berdasarkan tabel diatas Stasiun PSDKP Tarakan memperoleh capaian Nilai Kualitas Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Pemanfaat Sumber Daya Kelautan dengan capaian 100% dan tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena merupakan indikator baru. Capaian kinerja tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan rencana strategis 2020-2024 karena perbedaan indikator. Capaian tersebut didukung oleh hasil pemeriksaan pelaku usaha di bidang kelautan dengan hasil pengukuran pada setiap Sub-IKU pada tabel diatas yaitu Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Kunjungan, Berita Acara Pemeriksaan, dan Laporan Hasil Pemeriksaan. Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian IKU tersebut antara lain:

- a. SDM Pengawas Perikanan dan Polsus PWP3K memiliki kompetensi.
- b. Pemerintah pusat dan daerah aktif dalam penggalakan Sosialisasi peraturan dan kebijakan baik melalui media sosial ataupun secara langsung.
- c. Untuk peningkatan Kompetensi diselenggarakan Bimtek.
- d. Pelaku Usaha sudah patuh hukum dan paham terkait sanksi pelanggaran.

Secara umum kendala yang dihadapi pada proses pencapaian kinerja terkait IKU ini adalah dengan terbitnya peraturan terkait Pelaksanaan Teknis Pengawasan Pelaku Usaha Kelautan yang masih belum optimal karena pemahaman mengenai teknis pelaksanaan masih bersifat subyektif. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka perlu dilakukan internalisasi secara rutin terkait teknis pengawasan SDK sehingga seluruh SDM lingkup Stasiun PSDKP Tarakan dapat sepemahaman terkait Teknis Pengawasan SDK.

Tabel 9. Perbandingan Pencapaian IKU ke-2 dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2023

No.	UPT	Target 2023	Capaian2023	Persentase Capaian 2023
1	Stasiun PSDKP Tarakan	100	100	100
2	Stasiun PSDKP Biak	100	100	100
3	Stasiun PSDKP Ambon	100	100	100
4	Stasiun PSDKP Tahuna	100	100	100
5	Stasiun PSDKP Pontianak	100	100	100
6	Stasiun PSDKP Cilacap	100	100	100
7	Stasiun PSDKP Kupang	100	100	100
8	Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100

Secara umum capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan pada IKU Nilai Kualitas Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Pemanfaat Sumber Daya Kelautan lingkup Stasiun PSDKP Tarakan termasuk baik bila dibandingkan dengan UPT sejenis/setara dengan capaian tahunan sebesar 100%.

Kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama pada IKU ini selama Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

a. Jumlah Pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya lingkup Stasiun PSDKP Tarakan.

Adapun capaian pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya lingkup Stasiun PSDKP Tarakan tercapai 11 pelaku usaha pada Tahun 2023.

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp.12,803,257,- (Dua Belas Juta Delapan Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 33,350,000,- (Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau sebesar 38.4%. Realisasi anggaran ini digunakan dalam rangka dukungan pengawasan Pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan

limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya lingkup Stasiun PSDKP Tarakan.

b. Jumlah pelaku usaha perikanan yang diawasi dari kegiatan Destructive Fishing lingkup Stasiun PSDKP Tarakan.

Adapun capaian pengawasan Jumlah pelaku usaha perikanan yang diawasi dari kegiatan Destructive Fishing lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yaitu 49 pelaku usaha. Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp.63,530,362,- (Enam Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) dari anggaran yang dialokasikan sesuai dengan Rencana Aksi sebesar Rp.159,000,000,- (Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Rupiah) atau sebesar 39.96%. Realisasi anggaran ini digunakan dalam rangka dukungan pengawasan pelaku usaha perikanan yang diawasi dari kegiatan Destructive Fishing lingkup Stasiun PSDKP Tarakan.

c. Jumlah Unit Usaha Sektor Kelautan yang diawasi kepatuhannya

Adapun capaian pengawasan pelaku usaha sektor kelautan yang diawasi kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yaitu 19 pelaku usaha. Terdiri dari Pengawasan Pengelolaan Jenis Ikan yang Dilindungi; Pengawasan Pengelolaan Produk dan Jasa Kelautan; Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Nasional.

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp.299,607,160,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tujuh Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah) dari anggaran yang dialokasikan sesuai Rencana Aksi sebesar Rp.906,091,000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) atau sebesar 33.07%.

- Jumlah pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Tarakan.

Adapun capaian pengawasan pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yaitu 6 pelaku usaha kategori "Patuh".

- Jumlah pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Tarakan.

Adapun capaian jumlah pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yaitu 7 pelaku usaha.

- **Jumlah Pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Tarakan.**

Adapun capaian sub IKU jumlah pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yaitu 6 pelaku usaha.

- **Jumlah Pelaku usaha Pelaku usaha Pemanfaatan Ruang Laut Nasional yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Tarakan.**

Adapun capaian sub IKU Jumlah Pelaku usaha Pelaku usaha Pemanfaatan Ruang Laut Nasional yang diperiksa kepatuhannya lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yaitu 4 pelaku usaha.

3. Sasaran Kegiatan 3:

Tersedianya data dan informasi intelijen perikanan

Untuk mencapai SK3 Tersedianya data dan informasi intelijen perikanan, sasaran strategis ini didukung oleh 1 IKU yaitu Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen perikanan (%). Penjabaran IKU tersebut dijelaskan sebagai berikut:

IKU 3 : Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen perikanan (%)

Intelijen ialah kegiatan yaitu segala usaha, tindakan dan kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk penyelidikan, pengamanan dan penggalangan. Data dan informasi intelijen perikanan yaitu data dan informasi yang dikumpulkan oleh Pengawas Perikanan atau pihak yang diberikan tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas intelijen terhadap dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya perikanan atau terkait isu yang memerlukan klarifikasi.

Penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen perikanan yaitu data intelijen yang sudah dalam bentuk produk atau bahan keterangan yang sudah dikumpulkan atau diolah yang selanjutnya disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan penyusunan rencana, kebijakan, dan pengambilan keputusan/ penindakan yang akan ditempuh.

Tabel 10. Hasil Pengukuran IKU Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen perikanan (%)

INDIKATOR KINERJA	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Renstra 2020-2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	
Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen perikanan (%)	-	-	-	-	-	-	100	100	-	-

Berdasarkan tabel diatas Stasiun PSDKP Tarakan memperoleh capaian Persentase penyelesaian pengumpulan data dan informasi intelijen perikanan dengan capaian 100% dan tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena merupakan indikator baru. Capaian kinerja tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan rencana strategis 2020-2024 karena perbedaan indikator. Capaian tersebut didukung oleh kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan yang dilaksanakan oleh Pengawas Perikanan dan tindak lanjut atas aduan masyarakat atas dugaan pelanggaran. Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian IKU adalah SDM Pengawas Perikanan yang kompeten dalam melaksanakan tugas dan pelaporan hasil kerja secara rutin sehingga terdokumentasi secara rutin. Secara umum kendala yang dihadapi pada proses pencapaian kinerja terkait IKU ini adalah keterbatasan anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan pengumpulan bahan dan keterangan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka dilakukan penyusunan rencana kegiatan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan tingkat kerawanan pelanggaran.

Tabel 11. Perbandingan Pencapaian IKU ke-3 dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2023

No.	UPT	Target 2023	Capaian2023	Persentase Capaian 2023
1	Stasiun PSDKP Tarakan	100	100	100
2	Stasiun PSDKP Biak	100	100	100
3	Stasiun PSDKP Ambon	100	100	100
4	Stasiun PSDKP Tahuna	100	100	100
5	Stasiun PSDKP Pontianak	100	100	100

No.	UPT	Target 2023	Capaian2023	Persentase Capaian 2023
6	Stasiun PSDKP Cilacap	100	100	100
7	Stasiun PSDKP Kupang	100	100	100
8	Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100

Secara umum capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan pada IKU Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Stasiun PSDKP Tarakan termasuk baik bila dibandingkan dengan UPT sejenis/setara dengan capaian tahunan sebesar 100%.

4. Sasaran Kegiatan 4:

Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha perikanan yang sesuai ketentuan

Pencapaian Sasaran Kegiatan "Terselenggaranya pengawasan pelaku usaha perikanan yang sesuai ketentuan" diidentifikasi ke dalam 1 (satu) IKU, yaitu:

IKU 4 : Nilai Kualitas Pemeriksaan Pelaku Usaha dan Pemanfaat Sumber Daya Perikanan (Nilai)

Pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha bidang perikanan adalah upaya pengawasan usaha perikanan oleh Pengawas Perikanan dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian kegiatan pelaku usaha perikanan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaporan hasil pengawasan.

Pemeriksaan pelaku usaha perikanan meliputi pelaku usaha pelaku usaha kapal perikanan (penangkapan dan/atau pengangkutan), pelaku usaha pembudidayaan ikan, pelaku usaha pengolahan ikan, pelaku usaha pemasaran dan distribusi hasil perikanan.

Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan merupakan penjumlahan dari nilai tahapan pemeriksaan untuk setiap pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan.

Penentuan Nilai kualitas pemeriksaan pelaku usaha dan/atau pemanfaat sumber daya perikanan mengacu pada tabel berikut ini :

Tabel 12. Tahapan pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan lingkup Stasiun PSDKP Tarakan

No	Kegiatan	Nilai	Output
1	Persiapan a. membuat jadwal pemeriksaan; b. berkoordinasi dengan pelaku usaha yang akan diperiksa; c. menyusun administrasi pemeriksaan; dan/atau d. rapat persiapan pemeriksaan	10	- Surat tugas, surat pemberitahuan kepada pelaku usaha, daftar pertanyaan
2	Pelaksanaan pemeriksaan pelaku usaha	70	- Hasil pengawasan, form pengawasan dan/atau data dukung
3	Penyusunan laporan hasil pengawasan ditembuskan kepada Direktur PPSDP	20	Laporan pemeriksaan pelaku usaha
Jumlah Nilai		100	

Rincian hasil capaian IKU Nilai Kualitas Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Pemanfaat Sumber Daya Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan disajikan didalam tabel dibawah ini.

Tabel 13. Capaian Jumlah Output Nilai Kualitas Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Pemanfaat Sumber Daya Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Nilai	Realisasi Tahun 2023	Nilai
1	Penyelesaian Pemeriksaan Pengawasan Rutin berbasis OSS	35		9	100
2	Penyelesaian Pemeriksaan Pengawasan Penangkapan Ikan Terukur				
3	Penyelesaian Pemeriksaan Pengawasan Importasi Hasil Pemeriksaan				
4	Penyelesaian Pemeriksaan Pengawasan Kegiatan Budidaya Ikan Prioritas Nasional			10	100
5	Penyelesaian Pemeriksaan Pengawasan Pengelolaan Komoditas Lobster, Kepiting dan Rajungan			3	100

No	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Nilai	Realisasi Tahun 2023	Nilai
6	Penyelesaian Pemeriksaan Pengawasan Insidental			13	100
TOTAL		35	100	35	100

Tabel 14. Hasil Pengukuran IKU Nilai Kualitas Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Pemanfaat Sumber Daya Perikanan (Nilai)

INDIKATOR KINERJA	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Renstra 2020-2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	
Nilai Kualitas Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Pemanfaat Sumber Daya Perikanan (Nilai)	-	-	-	-	-	-	100	100	-	

Berdasarkan tabel diatas Stasiun PSDKP Tarakan memperoleh capaian Nilai Kualitas Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Pemanfaat Sumber Daya Perikanan dengan capaian 100% dan tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya karena merupakan indikator baru. Capaian kinerja tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan rencana strategis 2020-2024 karena perbedaan indikator. Capaian tersebut didukung oleh hasil pemeriksaan pelaku usaha di bidang perikanan dengan hasil pengukuran pada setiap Sub-IKU pada tabel diatas yaitu Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Kunjungan, Berita Acara Pemeriksaan, dan Laporan Hasil Pemeriksaan. Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian IKU tersebut antara lain:

- a. SDM Pengawas Perikanan memiliki kompetensi.
- b. Pemerintah pusat dan daerah aktif dalam penggalakan Sosialisasi peraturan dan kebijakan baik melalui media sosial ataupun secara langsung.
- c. Pelaku Usaha sudah patuh hukum dan paham terkait sanksi pelanggaran.

Secara umum kendala yang dihadapi pada proses pencapaian kinerja terkait IKU ini adalah Jadwal pelaksanaan pengawasan OSS tidak tepat waktu karena harus dilakukan penyesuaian antara ketersediaan waktu Pengawas Perikanan selaku pelaksana kegiatan dengan input pengajuan pengawasan melalui OSS oleh BKPM dan Terbatasnya SDM Pengawas Perikanan, sehingga tertunda pelaksanaan kegiatan pengawasan apabila

terdapat kegiatan lain yang lebih prioritas. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka perlu dilakukan koordinasi secara berkala antara UPT, PPSDP, dan BKPM apabila terdapat perubahan waktu pelaksanaan dapat segera disesuaikan dan mengajukan beberapa personel untuk mengikuti Bimtek teknis Pengawas Perikanan.

Tabel 15. Perbandingan Pencapaian IKU ke-4 dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2023

No.	UPT	Target 2023	Capaian2023	Persentase Capaian 2023
1	Stasiun PSDKP Tarakan	100	100	100
2	Stasiun PSDKP Biak	100	100	100
3	Stasiun PSDKP Ambon	100	100	100
4	Stasiun PSDKP Tahuna	100	100	100
5	Stasiun PSDKP Pontianak	100	100	100
6	Stasiun PSDKP Cilacap	100	100	100
7	Stasiun PSDKP Kupang	100	100	100
8	Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100

Secara umum capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan pada IKU Nilai Kualitas Pemeriksaan Kepatuhan Pelaku Usaha Pemanfaat Sumber Daya Perikanan lingkup Stasiun PSDKP Tarakan termasuk baik bila dibandingkan dengan UPT sejenis/setara dengan capaian tahunan sebesar 100%.

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp. 249.545.860 (Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Empat Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Rupiah) dari anggaran yang dialokasikan sesuai Rencana Aksi sebesar Rp. 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) atau sebesar 99.82%.

Kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama pada IKU ke 4 Tahun 2023 yaitu Pengawasan Rutin Berbasis OSS terhadap 9 lembaga/unit usaha, Pengawasan kegiatan budidaya ikan program prioritas nasional terhadap 10 pelaku usaha, Pengawasan pengelolaan komoditas lobster, kepiting dan Rajungan (LKR) terhadap 3 Pelaku usaha, serta Pengawasan Insidental terhadap 13 lembaga/unit usaha.

5. Sasaran Kegiatan 5:

Terselenggaranya Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat yang Partisipatif

Untuk mencapai SK5 Terselenggaranya Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat yang Partisipatif, sasaran strategis ini didukung oleh 1 IKU yaitu Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas (indeks). Penjabaran IKU tersebut dijelaskan sebagai berikut:

IKU 5 : Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas (indeks)

Indeks Kualitas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi;

Indeks kualitas pembinaan POKMASWAS adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kualitas terhadap kegiatan pembinaan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam kegiatan pembinaan POKMASWAS untuk terciptanya Sistem Pengawasan berbasis Masyarakat (SIMSWASMAS) secara baik dan efektif;

Dalam hal ini, di wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan kegiatan pembinaan Pokmaswas dan dituangkan dalam sebuah laporan (80%).

Pembinaan POKMASWAS adalah kegiatan pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan, konsultasi, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan, yang dilakukan melalui pembekalan, sosialisasi dan/atau bimbingan teknis kepada anggota POKMASWAS guna meningkatkan pengetahuan dan partisipasi aktif POKMASWAS dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;

Indek kualitas pembinaan POKMASWAS dinilai terhadap kualitas kegiatan pembinaan POKMASWAS yang dilaksanakan oleh UPT dan Dinas Kelautan dan Perikanan.

Komponen penilaian kegiatan pembinaan POKMASWAS antara lain:

- a. Rencana kerja kegiatan pembinaan;
- b. Pendataan keaktifan POKMASWAS;
- c. Pelaksanaan kegiatan pembinaan.

Tabel 16. Hasil Pengukuran IKU Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas (indeks)

INDIKATOR KINERJA	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Renstra 2020-2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	
Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas (indeks)	-	-	-	-	-	-	80	100	-	-

Berdasarkan tabel diatas Stasiun PSDKP Tarakan memperoleh capaian Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas (indeks) dengan nilai indeks 100 dengan capaian kinerja 120% yang diperoleh dari hasil perhitungan indikator kuantitatif dan kualitatif yang di kuantitatifkan yang dicapai oleh Stasiun PSDKP Tarakan selama Tahun 2023. IKU Indeks Kualitas Pembinaan POKMASWAS Tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan Capaian IKU tahun sebelumnya karena perbedaan indikator kinerja. IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan pada tahun anggaran 2023. Capaian kinerja tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan rencana strategis 2020-2024 karena perbedaan indikator.

Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian IKU tersebut yakni dengan pelaksanaan Kegiatan Pembinaan POKMASWAS telah dilaksanakan pada Bulan November Tahun 2023 dengan tema Sosialisasi Sosialisasi Penguatan Peran Masyarakat Dalam Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Melalui Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat bertempat di Ruang Bangkirai Jatra Hotels & Resort PAM Tower 2nd Floor, Balikpapan Superblock, Jl. Jenderal Sudirman No. 47, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 75 peserta dari POKMASWAS di wilayah Kota Balikpapan. Secara umum kendala yang dihadapi pada proses pencapaian kinerja terkait IKU ini adalah komunikasi dengan Staff ahli DPR yang belum optimal sehingga pelaksanaan kegiatan tertunda dan kendala revisi tambahan anggaran kegiatan yang membutuhkan waktu. Sebagai langkah antisipasi kendala tersebut, telah dilakukan komunikasi yang lebih intens lagi dengan Staff Ahli serta pembentukan Tim Kerja dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan.

Tabel 17. Perbandingan Pencapaian IKU ke-5 dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2023

No.	UPT	Target 2023	Capaian2023	Persentase Capaian 2023
1	Stasiun PSDKP Tarakan	80	100	120%
2	Stasiun PSDKP Ambon	80	100	120%
3	Stasiun PSDKP Pontianak	80	100	120%
4	Stasiun PSDKP Cilacap	80	100	120%
5	Stasiun PSDKP Kupang	80	100	120%
6	Stasiun PSDKP Belawan	80	100	120%
7	Stasiun PSDKP Biak	-	-	-
8	Stasiun PSDKP Tahuna	-	-	-

Secara umum capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan pada IKU Indeks Kualitas Pembinaan Pokmaswas (indeks) lingkup Stasiun PSDKP Tarakan termasuk baik bila dibandingkan dengan UPT sejenis/setara dengan capaian tahunan sebesar 100%.

6. Sasaran Kegiatan 6:

Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif

Untuk mencapai SK6 Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP yang efektif, sasaran strategis ini didukung oleh 3 IKU yaitu Indeks kinerja operasi kapal pengawas, Indeks kinerja operasi speedboat pengawas dan Persentase pemenuhan logistic kapal pengawas. Penjabaran masing-masing IKU dijelaskan sebagai berikut:

IKU 6 : Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (indeks)

Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. Ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional kapal pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Penilaian kinerja dari IKU ini dilakukan Triwulanan pada tahun anggaran berdasarkan indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

- a. Pemeriksaan yang terdiri dari pemeriksaan Kapal Perikanan dan pemeriksaan Kelautan;
- b. Cakupan wilayah pengawasan;
- c. Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR;
- d. Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.

Tabel 18. Hasil Pengukuran IKU Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (indeks)

INDIKATOR KINERJA	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Renstra 2020-2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	
Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (Indeks)	-	-	-	-	85	95,33	87,6	99,16	-	

Berdasarkan tabel diatas Stasiun PSDKP Tarakan memperoleh capaian Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (indeks) dengan nilai indeks 99,16 dan capaian kinerja sebesar 113,10% dan bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, Stasiun PSDKP Tarakan mampu meningkatkan capaian kinerjanya dengan peningkatan nilai indeks sebesar 3,83. Capaian kinerja tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan rencana strategis 2020-2024 karena perbedaan indikator. Capaian tersebut diperoleh dari hasil perhitungan indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan yang dicapai oleh Kapal Pengawas Hiu 007 selama Tahun 2023. Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian IKU tersebut yakni Gelar Operasi Kapal Pengawas Hiu 07 selama 6 (enam) Periode Operasi dengan total hari operasi sebanyak 73 hari dan total pemeriksaan kapal sebanyak 150 kapal (target 156 kapal). Dari 150 kapal yang diperiksa tersebut, 10 kapal diantaranya ditangkap dan dikawal untuk ditindak lanjut atas dugaan pelanggaran dan akan diproses pemberian sanksi administrasi. Secara umum kendala yang dihadapi pada proses pencapaian kinerja terkait IKU ini adalah kondisi teknis kapal yang tidak memungkinkan untuk beroperasi dan kondisi cuaca yang buruk. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka telah dilakukan Docking kapal pengawas yang dilanjutkan dengan Instalasi Repowering dan Perawatan Main Engine Kapal Pengawas Hiu 07.

Tabel 19. Perbandingan Pencapaian IKU ke-6 dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2023

No.	UPT	Target 2023	Capaian2023	Persentase Capaian 2023
1	Stasiun PSDKP Biak	87,6	100	114,16%
2	Stasiun PSDKP Cilacap	87,6	100	114,16%
3	Stasiun PSDKP Kupang	87,6	100	114,16%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	87,6	99,53	113,62%
5	Stasiun PSDKP Belawan	87,6	99,41	113,48%
6	Stasiun PSDKP Tarakan	87,6	99,16	113,10%
7	Stasiun PSDKP Ambon	87,6	96,16	109,77%
8	Stasiun PSDKP Pontianak	87,6	95,94	109,52%

Secara umum capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan pada IKU Indeks Kinerja Operasi Kapal Pengawas (Indeks) lingkup Stasiun PSDKP Tarakan termasuk baik bila dibandingkan dengan UPT sejenis/setara dengan capaian tahunan sebesar 113,10%.

IKU 7 : Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas (Indeks)

Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu suatu organisasi menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi. ukuran yang digunakan untuk membantu menentukan dan mengukur kemajuan terhadap operasional Speed Boat Pengawas agar terwujudnya pengendalian dan pengawasan SDKP yang profesional dan partisipatif. Penilaian kinerja dari IKU ini berdasarkan indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni:

- a. Pemeriksaan yang terdiri dari Pemeriksaan Kapal Perikanan dan Pemeriksaan Kelautan;
- b. Cakupan wilayah pengawasan;
- c. Tindak Lanjut Target Operasi yang terdiri dari Intercept indikasi pelanggaran Kelautan dan Perikanan dan Dukungan Kegiatan SAR;
- d. Hasil Dukungan kegiatan operasi lainnya yang terdiri dari Penyitaan Alat Tangkap Terlarang, Pemutusan Rumpon Illegal, dan Dukungan Operasi Bersama, Terkoordinasi, Interdiksi.

Tabel 20. Hasil Pengukuran IKU Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas (indeks)

INDIKATOR KINERJA	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Renstra 2020-2024
	T	R	T	R	T	R	T	R	T
Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas (Indeks)	-	-	-	-	85	99,14	87,6	98,93	-

Berdasarkan tabel diatas Stasiun PSDKP Tarakan memperoleh capaian Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas (indeks) dengan nilai indeks 98,93 dan capaian kinerja sebesar 112,56% dan bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, Stasiun PSDKP Tarakan mengalami penurunan capaian kinerja dengan selisih nilai indeks sebesar -0,21. Capaian kinerja tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan rencana strategis 2020-2024 karena perbedaan indikator. Capaian tersebut diperoleh dari hasil perhitungan indikator kuantitatif dan kualitatif yang dikuantitatifkan yang dicapai oleh Speedboat Pengawas lingkup Stasiun PSDKP Tarakan selama Tahun 2023.

Keberhasilan pencapaian indikator ini diperoleh dari Gelar Operasi Speedboat Pengawas Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yang berada di Stasiun PSDKP Tarakan, Satwas SDKP Nunukan, Satwas SDKP Banjarmasin, Satwas SDKP Kotabaru dan Satwas SDKP Balikpapan. Capaian Rata-rata hari operasi speedboat adalah sebesar 18 hari operasi dengan rata-rata kapal yang diperiksa adalah 14 Kapal/hari dengan 6 kapal diserahkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan guna dilakukan pembinaan. Kendala yang dihadapi adalah situasi cuaca yang buruk sehingga menghambat jadwal operasi yang sudah direncanakan dan jumlah operator speedboat yang tidak memadai dengan jumlah sarana yang ada. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka telah merencanakan rekrutmen Penyedia Jasa Lainnya Perorangan dengan spesifikasi operator speedboat untuk Tahun anggaran 2024.

Tabel 21. Perbandingan Pencapaian IKU ke-7 dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2023

No.	UPT	Target 2023	Capaian2023	Persentase Capaian 2023
1	Stasiun PSDKP Biak	87,6	100	114,16%
2	Stasiun PSDKP Kupang	87,6	100	114,16%
3	Stasiun PSDKP Belawan	87,6	100	114,16%

No.	UPT	Target 2023	Capaian2023	Persentase Capaian 2023
4	Stasiun PSDKP Ambon	87,6	99,43	113,50%
5	Stasiun PSDKP Tarakan	87,6	98,93	112,93%
6	Stasiun PSDKP Cilacap	87,6	98,33	112,25%
7	Stasiun PSDKP Pontianak	87,6	93,67	106,93%
8	Stasiun PSDKP Tahuna	87,6	91,57	104,53%

Secara umum capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan pada IKU Indeks Kinerja Operasi Speedboat Pengawas (indeks) lingkup Stasiun PSDKP Tarakan termasuk baik bila dibandingkan dengan UPT sejenis/setara dengan capaian tahunan sebesar 112,93%.

IKU 8 : Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)

Logistik Kapal Pengawas meliputi Logistik Kapal dan Logistik Personil. Logistik Kapal Pengawas meliputi: BBM, Pelumas, Alat Pelayanan. Logistik Personil meliputi: Bahan Makanan AKP, Air Bersih, Senjata Api. Armada pengawasan dimaksud adalah Kapal Pengawas. Kegiatan Pemenuhan Logistik Armada Pengawasan dilaksanakan oleh UPT PSDKP.

Pemenuhan Kebutuhan BBM Kapal Pengawas diukur dari capaian target pemenuhan kebutuhan BBM dalam 1 triwulan. Pemenuhan kebutuhan pelumas diukur dari capaian target pemenuhan kebutuhan pelumas dalam 1 triwulan. Pemenuhan kebutuhan bahan makanan AKP diukur dari capaian target pemenuhan kebutuhan bahan makanan AKP dalam 1 triwulan. Pemenuhan kebutuhan air bersih Kapal Pengawas diukur dari capaian target pemenuhan kebutuhan air bersih dalam 1 triwulan. Pemenuhan kebutuhan alat pelayanan Kapal Pengawas diukur dari capaian target pemenuhan kebutuhan alat pelayanan Kapal Pengawas dalam 1 triwulan. Pemenuhan kebutuhan senjata api diukur dari capaian target pemenuhan kebutuhan senjata api dalam 1 triwulan

Tabel 22. Hasil Pengukuran IKU Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)

INDIKATOR KINERJA	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Renstra 2020-2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	
Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%)	-	-	-	-	-	-	100	100	100	-

Berdasarkan tabel diatas Stasiun PSDKP Tarakan memperoleh capaian Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%) dengan capaian 100% dan tidak dapat dibandingkan dengan Capaian IKU tahun sebelumnya karena perbedaan indikator kinerja. IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan pada tahun anggaran 2023. Capaian kinerja tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan rencana strategis 2020-2024 karena perbedaan indikator. Capaian tersebut diperoleh dari hasil perhitungan indikator kuantitatif yang dicapai oleh Armada Pengawasan SDKP lingkup Stasiun PSDKP Tarakan selama tahun 2023. Hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian IKU tersebut yakni pelaporan kebutuhan logistik oleh Kapal Pengawas Hiu disampaikan ke Stasiun PSDKP Tarakan secara rutin dan berkala, sehingga dapat ditindaklanjuti tepat waktu.

Tabel 23. Perbandingan Pencapaian IKU ke-8 dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2023

No.	UPT	Target 2023	Capaian 2023	Persentase Capaian 2023
1	Stasiun PSDKP Tarakan	100	100	100%
2	Stasiun PSDKP Biak	100	100	100%
3	Stasiun PSDKP Ambon	100	100	100%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	100	100	100%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	100	100	100%
6	Stasiun PSDKP Cilacap	100	100	100%
7	Stasiun PSDKP Kupang	100	100	100%
8	Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100%

Secara umum capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan pada IKU Persentase Pemenuhan Logistik Kapal Pengawas (%) lingkup Stasiun PSDKP Tarakan termasuk baik bila dibandingkan dengan UPT sejenis/setara dengan capaian tahunan sebesar 100%.

7. Sasaran Kegiatan 7:

Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan

Untuk mencapai SK7 Terselenggaranya Pembangunan Serta Perawatan Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan, sasaran strategis ini didukung oleh 2 (dua) IKU yaitu Persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan dan Persentase pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP. Penjabaran masing-masing IKU dijelaskan sebagai berikut:

IKU 9 : Persentase Sarana dan Prasarana Pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)

Persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan adalah penilaian kemajuan fisik/konstruksi pengadaan speedboat pengawas sebanyak 2 (dua) unit yang diadakan oleh Pangkalan PSDKP Bitung sebanyak 1 (satu) unit dan Stasiun PSDKP Tarakan sebanyak 1 (satu) unit, serta pembangunan prasarana pengawasan SDKP sebanyak 4 (empat) unit yang dilaksanakan oleh Pangkalan PSDKP Bitung sebanyak 1 (satu) unit, Stasiun PSDKP Kupang sebanyak 1 (satu) unit, Stasiun PSDKP Belawan sebanyak 1 (satu) unit, Stasiun PSDKP Cilacap sebanyak 1 (satu) unit.

Pengadaan sarana pengawasan SDKP dilaksanakan di Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada dan UPT Ditjen PSDKP. Pembangunan prasarana pengawasan SDKP dilaksanakan di UPT Ditjen PSDKP. Penyelesaian pengadaan speedboat pengawas dan prasarana pengawasan SDKP ditargetkan selesai dalam satu tahun anggaran 2023.

Target indikator persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan sebesar 100%.

Tabel 24. Hasil Pengukuran IKU Persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)

INDIKATOR KINERJA	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Renstra 2020-2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	
Persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan (%)	-	-	-	-	-	-	100	100	-	

Berdasarkan tabel diatas Stasiun PSDKP Tarakan memperoleh capaian Persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan (%) dengan capaian 100% dan capaian kinerja sebesar 100% dan tidak dapat dibandingkan dengan Capaian IKU tahun sebelumnya karena perbedaan indikator kinerja. IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan pada tahun anggaran 2023. Capaian kinerja tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan rencana strategis 2020-2024 karena perbedaan indikator. Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian IKU tersebut yakni Pembangunan 1 (satu) unit Sarana Pengawasan SDKP berupa Kapal Pengawas Tipe VI Albacore 03 yang selesai dibangun pada Bulan November tahun 2023 dan Pembangunan 1 (satu) unit Prasarana Pengawasan SDKP berupa masterplan pembangunan gedung Pos Pengawasan SDKP Kotabaru yang telah serah terima pada bulan Desember tahun 2023.

Tabel 25. Perbandingan Pencapaian IKU ke-9 dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2023

No.	UPT	Target 2023	Capaian2023	Persentase Capaian 2023
1	Stasiun PSDKP Tarakan	100	100	100%
2	Stasiun PSDKP Cilacap	100	100	100%
3	Stasiun PSDKP Kupang	100	100	100%
4	Stasiun PSDKP Belawan	60	57,04	95,07%
5	Stasiun PSDKP Biak	-	-	-
6	Stasiun PSDKP Ambon	-	-	-
7	Stasiun PSDKP Tahuna	-	-	-

No.	UPT	Target 2023	Capaian2023	Persentase Capaian 2023
8	Stasiun PSDKP Pontianak	-	-	-

Secara umum capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan pada IKU Persentase sarana dan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan (%) lingkup Stasiun PSDKP Tarakan termasuk baik bila dibandingkan dengan UPT sejenis/setara dengan capaian tahunan sebesar 100%.

IKU 10 : Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP (%)

Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP adalah Jumlah persentase kegiatan Pemeliharaan dan perawatan sarana pengawasan SDKP yang dapat diselesaikan dalam mendukung kesiapan operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Sarana Pengawasan SDKP meliputi : 30 (tiga puluh) unit Kapal Pengawas Perikanan dan 90 (sembilan puluh) unit (Speedboat, Rigid Inflatable Boat, dan Rubber Boat) [d disesuaikan dengan jumlah unit/asset masing-masing Satker].

Perawatan Sarana Pengawasan SDKP terdiri dari :

- perawatan pencegahan (preventive maintenance 50%),
- perawatan prediktif (predictive maintenance 40 %)
- perawatan darurat (breakdown maintenance 10%).

Tabel 26. Hasil Pengukuran IKU Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP (%)

INDIKATOR KINERJA	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Renstra 2020-2024
	T	R	T	R	T	R	T	R	T
Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP (%)	-	-	-	-	-	-	100	100	-

Berdasarkan tabel diatas Stasiun PSDKP Tarakan memperoleh capaian Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP (%) dengan capaian 100% dan capaian kinerja sebesar 100% dan tidak dapat dibandingkan dengan Capaian IKU tahun sebelumnya karena perbedaan indikator kinerja. IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan pada tahun anggaran 2023. Capaian kinerja tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan rencana strategis 2020-2024 karena perbedaan indikator. Hal-hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian IKU tersebut penyelesaian perawatan sarana pengawasan SDKP berupa 1 (satu) unit Kapal Pengawas dan 6 (enam) unit Speedboat Pengawas yang selesai tepat waktu dan sesuai rencana.

Tabel 27. Perbandingan Pencapaian IKU ke-10 dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2023

No.	UPT	Target 2023	Capaian2023	Persentase Capaian 2023
1	Stasiun PSDKP Tarakan	100	100	100
2	Stasiun PSDKP Biak	100	100	100
3	Stasiun PSDKP Ambon	100	100	100
4	Stasiun PSDKP Tahuna	100	100	100
5	Stasiun PSDKP Pontianak	100	100	100
6	Stasiun PSDKP Cilacap	100	100	100
7	Stasiun PSDKP Kupang	100	100	100
8	Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100

Secara umum capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan pada IKU Persentase Pemeliharaan dan Perawatan Sarana Pengawasan SDKP (%) lingkup Stasiun PSDKP Tarakan termasuk baik bila dibandingkan dengan UPT sejenis/setara dengan capaian tahunan sebesar 100%.

8. Sasaran Kegiatan 8:

Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan Yang Tuntas

Dukungan terhadap pencapaian target SK8 Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan Dan Perikanan yang tuntas diperoleh dari 3 (tiga) IKU yaitu Indeks Penganan Sanksi Administrasi Bidang Kelautan dan Perikanan, Indeks Pemeriksaan Hasil

Analisis Pemantauan Kapal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administrasi. Penjelasan capaian IKU tersebut dijabarkan sebagai berikut:

IKU 11 : Indeks Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan (Indeks)

Indeks pengenaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (KP) merupakan pengukuran kinerja atas pelaksanaan pengenaan sanksi administratif di bidang kelautan dan perikanan yang ditetapkan pertama kali oleh pejabat berwenang, pada:

- a. Dit. PP (Pusat) untuk pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-2 (SP2)/surat penetapan denda administratif/rekomendasi pencabutan/pembekuan izin;
- b. Dit. PP untuk pengenaan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut untuk pelanggaran skala besar/mendapat perhatian publik, berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah.
- c. Dit. PP (Pusat) untuk penetapan denda administratif, atau rekomendasi pembekuan/pencabutan izin/ pemulihan fungsi ruang dari Dirjen PSDKP.
- d. UPT PSDKP untuk pengenaan sanksi atas pelanggaran SPKP berupa Surat Peringatan-1 (SP1)/Paksaan Pemerintah;
- e. UPT PSDKP untuk pengenaan sanksi administratif pelanggaran perizinan berusaha di bidang kelautan dan perikanan, pemanfaatan ruang laut, importasi komoditas perikanan dan pergaraman, penangkapan ikan terukur dan pengelolaan hasil sedimentasi di laut berupa surat peringatan (SP) atau paksaan pemerintah. Sampai dengan Tahun 2023, Stasiun PSDKP Tarakan telah menangani 10 (sepuluh) kasus/perkara pengenaan sanksi administratif yakni pelanggaran dalam pemanfaatan jenis ikan dilindungi, kegiatan penangkapan ikan tanpa membawa dokumen perizinan serta pelanggaran terhadap daerah penangkapan ikan.

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp. 81.401.728 (Delapan Puluh Satu Juta Empat Ratus Seribu Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) dari anggaran yang dialokasikan sesuai Rencana Aksi sebesar Rp. 81.420.000 (Delapan Puluh Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) atau sebesar

99,98%. Berikut rincian kasus peneraan sanksi administratif lingkup Stasiun PSDKP Tarakan.

Tabel 28. Rekapitulasi Penanganan Sanksi Administratif Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2023

No	Nama Pelaku Usaha / Kapal	Tgl. Pemeriksaan	Pelanggaran	Sanksi	Ket.
1	Eli Warsino	28 November 2022	Pelanggaran Terhadap Ketentuan Perlindungan dan Perizinan Jenis Ikan yang dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang tercantum dalam daftar CITES.	Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri KP. No. 61 Tahun 2018 dan Pasal 3 ayat (2) huruf d Permen KP No. 31 Tahun 2021 Denda administratif untuk disetorkan ke Kas Negara Rp. 6,600,000,- (Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)	Sudah Melakukan Pembayaran PNBPN pada tanggal 13 Februari 2023
2	H. Syamsuddin / KM. Arabiah / Saudi Arabiah	14 Februari 2023	Melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa membawa dokumen perizinan	27A ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Denda Administratif untuk disetorkan ke Kas Negara Rp.4,517,460,- (Empat Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah)	Sudah melakukan pembayaran PNBPN pada tanggal 28 Februari 2023
3	H. M. Salman / KM. Jabal Nur 12	14 Februari 2023	Melakukan kegiatan penangkapan ikan tanpa membawa dokumen perizinan	27A ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja dan	Sudah melakukan pembayaran PNBPN pada tanggal 28

No	Nama Pelaku Usaha / Kapal	Tgl. Pemeriksaan	Pelanggaran	Sanksi	Ket.
				Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Denda administratif untuk disetorkan ke Kas Negara Rp.1,694,160,- (Satu Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh Rupiah)	Februari 2023
4	Wartika / Sunaryo / KM. Suka 1	18 Februari 2023	Melanggar daerah penangkapan ikan	27A ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Denda administratif untuk disetorkan ke Kas Negara Rp.14,278,929,- (Empat Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah)	Sudah melakukan pembayaran PNBP pada tanggal 28 Februari 2023
5	Sumi / KM. Tambah Rejeki	28 Februari 2023	Melanggar daerah penangkapan ikan	27A ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Denda administratif untuk disetorkan ke Kas Negara	Sudah melakukan pembayaran PNBP pada tanggal 29 Maret 2023

No	Nama Pelaku Usaha / Kapal	Tgl. Pemeriksaan	Pelanggaran	Sanksi	Ket.
				Rp.160,252,400,- (Seratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah)	
6	Endah Prasetyorini / KM. Jaya Indah II	28 Februari 2023	Melanggar daerah penangkapan ikan	27A ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Denda administrative untuk disetorkan ke Kas Negara Rp.48,246,000,- (Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)	Sudah melakukan pembayaran PNBP pada tanggal 29 Maret 2023
7	Joko Susilo / KM. Barokah	25 Maret 2023	Melanggar daerah penangkapan ikan	27A ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Denda administrative untuk disetorkan ke Kas Negara Rp.79,490,800,- (Tujuh Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah)	Sudah melakukan pembayaran PNBP pada tanggal 05 April 2023

No	Nama Pelaku Usaha / Kapal	Tgl. Pemeriksaan	Pelanggaran	Sanksi	Ket.
8	Sofyan Sulistio / KM. Putra Manunggal 01	25 Maret 2023	Melanggar daerah penangkapan ikan	<p>27A ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan</p> <p>Denda administrative untuk disetorkan ke Kas Negara Rp.99,022,400,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Rupiah)</p>	Sudah melakukan pembayaran PNBP pada tanggal 05 April 2023
9	Karsono / KM. Slamet Mulyo Abadi	01 November 2023	Melanggar daerah penangkapan ikan	<p>27A ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan</p> <p>Denda administrative untuk disetorkan ke Kas Negara Rp.151,198,320,- (Seratus Lima Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah)</p>	Sudah melakukan pembayaran PNBP pada tanggal 18 November 2023
10	Udin Komarudin / PT. Karya Alam Gemilang	18 Oktober 2023	Pelanggaran atas Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan	27A ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang	Sudah melakukan pembayaran PNBP pada tanggal 12

No	Nama Pelaku Usaha / Kapal	Tgl. Pemeriksaan	Pelanggaran	Sanksi	Ket.
			Ruang Laut yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTR), Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)	Cipta Kerja dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Denda administrative untuk disetorkan ke Kas Negara Rp.37,360,000,- (Tiga Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)	Desember 2023

Tabel 29. Hasil Pengukuran IKU Indeks peneanaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)

INDIKATOR KINERJA	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Renstra 2020-2024
	T	R	T	R	T	R	T	R	T
Indeks peneanaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (Indeks)	-	-	-	-	-	-	80	100	-

Berdasarkan tabel diatas Stasiun PSDKP Tarakan memperoleh capaian Indeks peneanaan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan dengan capaian nilai indeks sebesar 100 dan capaian kinerja sebesar 120% dan tidak dapat dibandingkan dengan Capaian IKU tahun sebelumnya karena perbedaan indikator kinerja. IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan pada tahun anggaran 2023. Capaian kinerja tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan rencana strategis 2020-2024 karena perbedaan indikator. Hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian IKU tersebut yakni didukung dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Perikanan baik dalam operasi pengawasan oleh Kapal Pengawas SDKP dan Speedboat Pengawas SDKP maupun pengawasan rutin dan insidental yang dilaksanakan.

Tabel 30. Perbandingan Pencapaian IKU ke-11 dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2023

No.	UPT	Target 2023	Capaian2023	Persentase Capaian 2023
1	Stasiun PSDKP Tarakan	80	100	120%
2	Stasiun PSDKP Biak	80	100	120%
3	Stasiun PSDKP Ambon	80	100	120%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	80	100	120%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	80	100	120%
6	Stasiun PSDKP Cilacap	80	100	120%
7	Stasiun PSDKP Kupang	80	100	120%
8	Stasiun PSDKP Belawan	80	100	120%

Secara umum capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan pada IKU Indeks penerapan sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan (%) lingkup Stasiun PSDKP Tarakan termasuk baik bila dibandingkan dengan UPT sejenis/setara dengan capaian tahunan sebesar 120%.

IKU 12 : Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Kapal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Indeks)

Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Kapal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan merupakan kinerja pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang terhadap orang/pelaku usaha yang berdasarkan hasil analisis sistem pemantauan kapal terdapat dugaan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pemeriksaan dilaksanakan oleh: a). Kepala UPT PSDKP dimana pelaku usaha berdomisili; b). Kepala UPT PSDKP dimana kegiatan berusaha dilaksanakan atau dimana Kapal perikanan berpangkalan; atau; c). Ditjen PSDKP Pusat (Dit PP) dalam hal pemeriksaan tidak memungkinkan dilaksanakan oleh Kepala UPT PSDKP sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, atau apabila pelanggaran melibatkan pelaku usaha skala besar/ menjadi perhatian publik.

Tabel 31. Hasil Pengukuran IKU Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Kapal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Indeks)

INDIKATOR KINERJA	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Renstra 2020-2024
	T	R	T	R	T	R	T	R	T
Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Kapal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (indeks)	-	-	-	-	-	-	80	100	-

Berdasarkan tabel diatas Stasiun PSDKP Tarakan memperoleh capaian Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Kapal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (indeks) dengan capaian nilai indeks sebesar 100 dan capaian kinerja sebesar 120% dan dan tidak dapat dibandingkan dengan Capaian IKU tahun sebelumnya karena perbedaan indikator kinerja. IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan pada tahun anggaran 2023. Capaian kinerja tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan rencana strategis 2020-2024 karena perbedaan indikator. Hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian IKU tersebut yakni penyelesaian setiap laporan dugaan pelanggaran SPKP yang masuk sehingga dapat langsung diklarifikasi terhadap setiap dugaan pelanggaran tersebut.

Tabel 32. Perbandingan Pencapaian IKU ke-12 dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2023

No.	UPT	Target 2023	Capaian 2023	Persentase Capaian 2023
1	Stasiun PSDKP Tarakan	80	100	120%
2	Stasiun PSDKP Biak	80	100	120%
3	Stasiun PSDKP Ambon	80	100	120%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	80	100	120%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	80	100	120%
6	Stasiun PSDKP Kupang	80	100	120%
7	Stasiun PSDKP Belawan	80	100	120%
8	Stasiun PSDKP Cilacap	80	60	75%

Secara umum capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan pada IKU Indeks Pemeriksaan Hasil Analisis Pemantauan Kapal Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (indeks) lingkup Stasiun PSDKP Tarakan termasuk baik bila dibandingkan dengan UPT sejenis/setara dengan capaian tahunan sebesar 120%.

IKU 13 : Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif (Indeks)

Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif yaitu merupakan tingkat pencapaian kinerja. Supervisi/monev/permohonan penerbitan billing denda administratif, sebagai berikut :

- a) Dit.PP (Pusat) untuk permohonan penerbitan billing denda administratif dan rekomendasi pembukuan/pencabutan perizinan berusaha;
- b) UPT PSDKP Monitoring dan Evaluasi Sanksi Administratif yang dilakukan oleh UPT PSDKP.

Tabel 33. Hasil Pengukuran IKU Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif (Indeks)

INDIKATOR KINERJA	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Renstra 2020-2024
	T	R	T	R	T	R	T	R	T
Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif (indeks)	-	-	-	-	-	-	80	100	-

Berdasarkan tabel diatas Stasiun PSDKP Tarakan memperoleh capaian Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif (indeks) dengan capaian nilai indeks sebesar 100 dan capaian kinerja sebesar 120% dan tidak dapat dibandingkan dengan Capaian IKU tahun sebelumnya karena perbedaan indikator kinerja. IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan pada tahun anggaran 2023. Capaian kinerja tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan rencana strategis 2020-2024 karena perbedaan indikator. Hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian IKU tersebut yakni penyelesaian terhadap setiap sanksi administrasi yang ditetapkan tepat waktu.

Tabel 34. Perbandingan Pencapaian IKU ke-13 dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2023

No.	UPT	Target 2023	Capaian2023	Persentase Capaian 2023
1	Stasiun PSDKP Tarakan	80	100	120%
2	Stasiun PSDKP Biak	80	100	120%
3	Stasiun PSDKP Ambon	80	100	120%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	80	100	120%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	80	100	120%
6	Stasiun PSDKP Cilacap	80	100	120%
7	Stasiun PSDKP Kupang	80	100	120%
8	Stasiun PSDKP Belawan	80	100	120%

Secara umum capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan pada IKU Indeks Penyelesaian Tindak Lanjut Pengenaan Sanksi Administratif (indeks) lingkup Stasiun PSDKP Tarakan termasuk baik bila dibandingkan dengan UPT sejenis/setara dengan capaian tahunan sebesar 120%.

9. Sasaran Kegiatan 9:

Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas

Dukungan terhadap pencapaian target SK9 Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang Berkualitas diperoleh dari 1 (satu) IKU yaitu Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan. Penjelasan capaian IKU tersebut dijabarkan sebagai berikut:

IKU 14 : Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

Indeks penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan merupakan capaian perkembangan yang telah dilaksanakan dalam proses penyelesaian penyidikan tindak pidana kelautan dan perikanan berdasarkan tahapan-tahapan proses penyidikan mulai tahapan gelar perkara awal sampai dengan penyerahan berkas perkara dari PPNS kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan mengacu kepada Keputusan Dirjen PSDKP

Nomor : KEP.372/DJ-PSDKP/2011 perihal Petunjuk Teknis Penyidikan Tindak Pidana Perikanan. Berikut rincian perkembangan penyidikan sebagai dasar perhitungan capaian IKU:

Tabel 35. Rincian Tahapan Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan

NO	TAHAP PENYELESAIAN	PERSENTA SE PERKEMBA NGAN KEMAJUAN (%)	DATA DUKUNG YANG HARUS DIPENUHI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Administrasi Penyidikan				
1	Gelar Perkara Awal	5	1. Undangan 2. Hasil Gelar Perkara	
2	Penerbitan SPRINDIK	30	Surat Perintah Penyidik	Faktor internal berpengaruh besar terhadap tahapan Penyidikan
3	Penerbitan dan Pengiriman SPDP Kepada Kejaksaan Negeri	15	Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP)	
Pemeriksaan Saksi, Ahli, Tersangka				
4	Pemeriksaan Saksi, Ahli, Tersangka dan Penyusunan Resume	30	Resume dan sampul berkas perkara (terdapat nomor berkas perkara)	Perhitungan secara akumulatif harus dipenuhi seluruhnya untuk mencapai target (Dikecualikan untuk Pemeriksaan Ahli, yg mana jika tidak ada Pemeriksaan Ahli pada saat penanganan perkara, maka pemeriksaan Ahli tidak menjadi nilai akumulatif)
5	Pengiriman berkas kepada Kejaksaan dan/atau Perbaikan Berkas Perkara	15	1. Surat Pengantar Penyampaian Berkas Perkara. 2. Tanda terima Penyerahan Tahap I dan BA serah terima berkas perkara.	Perbaikan berkas perkara dilakukan jika ada P-19
6	P-21	3	Surat P – 21 dari Kejaksaan Negeri	Dominan Pihak JPU
7	Tahap II	2	Berita Acara Tahap II	
JUMLAH		100		

Tabel 36. Hasil Pengukuran IKU Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (Indeks)

INDIKATOR KINERJA	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Renstra 2020-2024
	T	R	T	R	T	R	T	R	T
Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (indeks)	-	-	-	-	-	-	93	100	-

Berdasarkan tabel diatas Stasiun PSDKP Tarakan memperoleh capaian Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (indeks) dengan capaian nilai indeks sebesar 100 dan capaian kinerja sebesar 107,53% dan tidak dapat dibandingkan dengan Capaian IKU tahun sebelumnya karena perbedaan indikator kinerja. IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan pada tahun anggaran 2023. Capaian kinerja tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan rencana strategis 2020-2024 karena perbedaan indikator. Hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian IKU tersebut yakni didukung dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas Perikanan baik dalam operasi pengawasan oleh Kapal Pengawas SDKP dan Speedboat Pengawas SDKP maupun pengawasan rutin dan insidental yang dilaksanakan.

Tabel 37. Perbandingan Pencapaian IKU ke-14 dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2023

No.	UPT	Target 2023	Capaian2023	Persentase Capaian 2023
1	Stasiun PSDKP Tarakan	93	100	107,53%
2	Stasiun PSDKP Biak	93	100	107,53%
3	Stasiun PSDKP Ambon	93	100	107,53%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	93	100	107,53%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	93	100	107,53%
6	Stasiun PSDKP Cilacap	93	100	107,53%
7	Stasiun PSDKP Kupang	93	100	107,53%
8	Stasiun PSDKP Belawan	93	100	107,53%

Secara umum capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan pada IKU Indeks Penyelesaian Penyidikan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (indeks) lingkup Stasiun PSDKP Tarakan termasuk baik bila dibandingkan dengan UPT sejenis/setara dengan capaian tahunan sebesar 107,53%.

Pada Tahun 2023, Stasiun PSDKP Tarakan diberi target kasus TPKP sebanyak 2 (dua) kasus dengan target indeks penyelesaian kasus sebesar 93. Stasiun PSDKP Tarakan berhasil menyelesaikan 5 (lima) kasus pada tahun 2023, sehingga realisasinya mencapai 100%.

Realisasi anggaran yang telah tercapai dalam mendukung kegiatan ini adalah sebesar Rp. 188.707.593 (Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) dari anggaran yang dialokasikan sesuai Rencana Aksi sebesar Rp. 189.380.000 (Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) atau sebesar 99.64%. Berikut rekapitulasi daftar Kasus Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan yang berhasil diselesaikan pada Tahun 2023.

Tabel 38. Rekapitulasi Kasus TPKP Yang Berhasil Diselesaikan Pada Tahun 2023

TAHAPAN							Progres Tahun 2023	Target Tahun 2023
GPA (5)	Sprindik (30)	SPDP (15)	Saksi Ahli, Tersangka, Resume (30)	BA I (15)	P21 (3)	BA II (2)		
1. KM.SA-9108/5/R (KIA Malaysia), Otong Bin Baltafa								
√	√	√	√	√	√	√	100	93
2. KM.SA-9108/5/R (KIA Malaysia), Sulaiman Bin Jumairi								
√	√	√	√	√	√	√	100	93
3. KM.SA-9108/5/R (KIA Malaysia), Julsiti Bin Otong								
√	√	√	√	√	√	√	100	93
4. KM. IKHSAN 1, Hairuddin Bin Idrus								
√	√	√	√	√	√	√	100	93
5. KM. ARKANA 01, Bahruddin Bin H. Duhaling								
√	√	√	√	√	√	√	100	93

10. Sasaran Kegiatan 10 :

Tata kelola pemerintah yang baik lingkup Ditjen PSDKP

SK10 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik diikuti oleh 14 (empat belas) IKU yang terdiri dari: Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) kapal perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan; Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi hasil Penangkapan Ikan) Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan; Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju WBK Stasiun PSDKP Tarakan (nilai); Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko lingkup Stasiun PSDKP Tarakan; Indeks profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Tarakan; Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Tarakan (nilai); Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (nilai); Inovasi yang diterapkan pada unit kerja Stasiun PSDKP Tarakan (inovasi); Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%); Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%); Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan; Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan; Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup Stasiun PSDKP Tarakan; serta Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan. Penjelasan masing-masing IKU dijabarkan dibawah ini sebagai berikut :

IKU 11 : Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) kapal perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan

Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Ditjen. PSDKP adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Ditjen PSDKP.



Gambar 4. Hasil Perhitungan SKM Pelayanan SLO TW IV Tahun 2023

Tabel 39. Hasil Pengukuran IKU Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) kapal perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan

INDIKATOR KINERJA	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Renstra 2020-2024
	T	R	T	R	T	R	T	R	T
Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) kapal perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (indeks)	-	-	80	90,42	80	90,57	80	92,04	80

Di tahun 2023, target capaian terhadap IKU ini sebesar 80 per triwulannya. Nilai indeks diperoleh dari perhitungan kuisioner yang diisi oleh pengguna layanan SLO setiap triwulannya. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan telah dilakukan dengan nilai indeks sebesar 94,63 sehingga realisasi capaian IKU ini sebesar 92.04 (rata-rata TW I, II, III, dan IV) dari target 80, serta persentase capaian kerjanya sebesar 115.05%. Capaian ini mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dengan selisih nilai indeks sebesar 1,47. IKU tersebut merupakan indikator kinerja yang ditetapkan berdasarkan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024 dan apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 terdapat peningkatan nilai indeks dengan selisih capaian sebesar 12,04. Survei dilakukan terhadap 60 orang pengguna jasa layanan SLO yang ada di wilayah kerja Stasiun PSDKP Tarakan dengan latar Pendidikan dari SD, SMA, D3 dan S1. Keberhasilan pencapaian IKU ini diperoleh karena pengaruh beberapa unsur yang memiliki nilai rata-rata (NRR) yang tinggi yaitu; unsur Perilaku Pelaksana dengan capaian nilai rata-rata (NRR) sebesar 3.83 ; unsur Persyaratan Pelayanan dengan capaian nilai rata-rata (NRR) sebesar 3.86; dan unsur Prosedur Pelayanan dengan capaian nilai rata-rata (NRR) sebesar 3,83. Selain itu masih terdapat kendala dalam mencapai target IKU ini, yaitu adanya pengguna jasa yang masih kesulitan dalam pengisian formulir survey E-Susan. Sehingga kedepannya pengisian formulir survey akan dipandu oleh petugas pelayanan.

Tabel 40. Perbandingan Pencapaian IKU ke-15 dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2023

No.	UPT	Target 2023	Capaian2023	Persentase Capaian 2023
1	Stasiun PSDKP Biak	80	94,89	118,61%

No.	UPT	Target 2023	Capaian2023	Persentase Capaian 2023
2	Stasiun PSDKP Tahuna	80	94,14	117,68%
3	Stasiun PSDKP Kupang	80	93,62	117,03%
4	Stasiun PSDKP Tarakan	80	92,04	115,05%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	80	91,03	113,79%
6	Stasiun PSDKP Cilacap	80	90,03	112,54%
7	Stasiun PSDKP Ambon	80	88,50	110,63%
8	Stasiun PSDKP Belawan	80	79	98,75%

Secara umum capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan pada IKU Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) kapal perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (indeks) lingkup Stasiun PSDKP Tarakan termasuk baik bila dibandingkan dengan UPT sejenis/setara dengan capaian tahunan sebesar 115,05%.

IKU 12 : Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi hasil Penangkapan Ikan) Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan

Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan publik Ditjen. PSDKP adalah suatu ukuran untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Ditjen PSDKP.



Gambar 5. Hasil Perhitungan SKM Pelayanan LVHPI Tahun 2023

Tabel 41. Hasil Pengukuran IKU Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) kapal perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan

INDIKATOR KINERJA	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Renstra 2020-2024
	T	R	T	R	T	R	T	R	T
Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) kapal perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (indeks)	-	-	80	90,33	80	90,35	80	94,50	-

Di tahun 2023, target capaian terhadap IKU ini sebesar 80 per triwulannya. Nilai indeks diperoleh dari perhitungan kuisisioner yang diisi oleh pengguna layanan LVHPI setiap triwulannya. Pada TW III Tahun 2023, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) telah dilakukan dengan nilai indeks sebesar 97,07 sehingga realisasi capaian IKU ini sebesar 94.50 (rata-rata TW I, II, III, dan IV) dari target 80, serta persentase capaian kinerjanya sebesar 118,13%. Capaian ini mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dengan selisih nilai indeks sebesar 4,15. IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Renstra Ditjen PSDKP 2020-2024. Survei dilakukan terhadap 20 orang pengguna jasa layanan SLO yang ada di wilayah kerja Stasiun PSDKP Tarakan dengan latar Pendidikan dari SD, SMA, D3 dan S1. Keberhasilan pencapaian IKU ini diperoleh karena pengaruh beberapa unsur yang memiliki nilai rata-rata (NRR) yang tinggi yaitu; unsur Perilaku Pelaksana dengan capaian nilai rata-rata (NRR) sebesar 3.90 ; unsur Persyaratan Pelayanan dengan capaian nilai rata-rata (NRR) sebesar 3.90; dan unsur Prosedur Pelayanan dengan capaian nilai rata-rata (NRR) sebesar 3,90. Selain itu masih terdapat kendala dalam mencapai target IKU ini, yaitu adanya pengguna jasa yang masih kesulitan dalam pengisian formulir survey E-Susan. Sehingga kedepannya pengisian formulir survey akan dipandu oleh petugas pelayanan.

Tabel 42. Perbandingan Pencapaian IKU ke-16 dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2023

No.	UPT	Target 2023	Capaian2023	Persentase Capaian 2023
1	Stasiun PSDKP Tarakan	80	94,50	118,13%
2	Stasiun PSDKP Cilacap	80	90,83	113,54%
3	Stasiun PSDKP Belawan	80	90,37	112,96%
4	Stasiun PSDKP Pontianak	80	86,45	108,06%
5	Stasiun PSDKP Kupang	80	80	100%
6	Stasiun PSDKP Biak	-	-	-
7	Stasiun PSDKP Ambon	-	-	-
8	Stasiun PSDKP Tahuna	-	-	-

Secara umum capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan pada IKU Indeks kepuasan masyarakat pengguna layanan LVHPI (Lembar Verifikasi Hasil Penangkapan Ikan) kapal perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (indeks) lingkup Stasiun PSDKP Tarakan termasuk baik bila dibandingkan dengan UPT sejenis/setara dengan capaian tahunan sebesar 118,13%.

IKU 17 : Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK Stasiun PSDKP Tarakan (Nilai)

Komponen penilaian Wilayah Bebas Korupsi (WBK) meliputi manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja sesuai dengan PERMEN PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMEN PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah dan jika dinilai melalui penilaian mandiri berdasarkan Permen KP Nomor: 62/PERMEN-KP/2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kriteria:

1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;

2. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
3. Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN" minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 5,0.
4. Memiliki nilai komponen hasil "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat" minimal 15.

Penilaian		Bobot	Nilai	%
A. PENGUNGKIT		60,00	45,06	
I. PEMENUHAN		30,00	21,98	73,25%
	1. MANAJEMEN PERUBAHAN	4,00	2,90	72,51%
	2. PENATAAN TATALAKSANA	3,50	2,35	67,10%
	3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	5,00	3,44	68,80%
	4. PENGUATAN AKUNTABILITAS	5,00	4,12	82,31%
	5. PENGUATAN PENGAWASAN	7,50	4,74	63,17%
	6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	5,00	4,43	88,67%
II. REFORM		30,00	23,08	76,95%
	1. MANAJEMEN PERUBAHAN	4,00	3,75	93,75%
	2. PENATAAN TATALAKSANA	3,50	2,34	66,71%
	3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	5,00	4,25	85,00%
	4. PENGUATAN AKUNTABILITAS	5,00	4,01	80,20%
	5. PENGUATAN PENGAWASAN	7,50	4,98	66,36%
	6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	5,00	3,76	75,25%
TOTAL PENGUNGKIT			45,06	75,10%
B. HASIL		40,00	38,75	
I. BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL		22,50	21,25	94,44%
	a Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Anti Korupsi/ IPAK)	17,50	17,50	100,00%
	b Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja	5,00	3,75	75,00%
II. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA		17,50	17,50	100,00%
	a Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal :	17,50	17,50	100,00%
TOTAL HASIL			38,75	96,88%
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI			83,81	

Gambar 6. Hasil Penilaian Zona Integritas dalam rangka Pembangunan WBK / WBBM

Tabel 43. Hasil Pengukuran IKU Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK Stasiun PSDKP Tarakan (Nilai)

INDIKATOR KINERJA	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Renstra 2020-2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	
Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK Stasiun PSDKP Tarakan (Nilai) (indeks)	-	-	-	-	-	-	75	83,81	-	-

Berdasarkan tabel diatas Stasiun PSDKP Tarakan memperoleh capaian Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK Stasiun

PSDKP Tarakan dengan nilai capaian sebesar 83,81 dan tidak dapat dibandingkan dengan Capaian IKU tahun sebelumnya karena perbedaan indikator kinerja. IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan pada tahun anggaran 2023. Capaian kinerja tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan rencana strategis 2020-2024 karena perbedaan indikator. Hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian IKU tersebut yakni kerja sama Tim Zona Integritas satker Stasiun PSDKP Tarakan yang sangat baik sehingga pelaksanaan kegiatan rutin terkait Pembangunan Zona Integritas dapat terlaksana sesuai target.

Tabel 44. Perbandingan Pencapaian IKU ke-17 dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2023

No.	UPT	Target 2023	Capaian2023	Persentase Capaian 2023
1	Stasiun PSDKP Kupang	75	89,69	119,59%
2	Stasiun PSDKP Cilacap	75	88,92	118,56%
3	Stasiun PSDKP Tahuna	75	84,14	112,24%
4	Stasiun PSDKP Tarakan	75	83,81	111,75%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	75	82,67	110,23%
6	Stasiun PSDKP Belawan	75	80,51	107,35%
7	Stasiun PSDKP Biak	-	-	-
8	Stasiun PSDKP Ambon	-	-	-

Secara umum capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan pada IKU Nilai Minimal yang dipersyaratkan untuk Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK Stasiun PSDKP Tarakan (Nilai) lingkup Stasiun PSDKP Tarakan termasuk baik bila dibandingkan dengan UPT sejenis/setara dengan capaian tahunan sebesar 111,75%.

IKU 18 : Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%)

Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan

manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin.

Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi:

- a. Rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi
- b. Aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja
- c. Pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat komplektisitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian.

Penilaian risiko dilakukan melalui Form Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui Form Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan.

Tabel 45. Hasil Pengukuran IKU Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%)

INDIKATOR KINERJA	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Renstra 2020-2024
	T	R	T	R	T	R	T	R	T
Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%)	-	-	-	-	-	-	100	100	-

Berdasarkan tabel diatas Stasiun PSDKP Tarakan memperoleh capaian Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%) dengan capaian 100% dan tidak dapat dibandingkan dengan Capaian IKU tahun sebelumnya karena perbedaan indikator kinerja. IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan pada tahun anggaran 2023. Capaian kinerja tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan rencana strategis 2020-2024 karena perbedaan

indikator. Hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian IKU tersebut yakni kegiatan pengidentifikasian risiko guna dilaksanakan mitigasi agar risiko penghambat terlaksananya kegiatan maupun kendala realisasi anggaran mampu ditangani dengan baik.

Tabel 46. Perbandingan Pencapaian IKU ke-18 dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2023

No.	UPT	Target 2023	Capaian2023	Persentase Capaian 2023
1	Stasiun PSDKP Tarakan	100	100	100%
2	Stasiun PSDKP Biak	100	100	100%
3	Stasiun PSDKP Ambon	100	100	100%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	100	100	100%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	100	100	100%
6	Stasiun PSDKP Cilacap	100	100	100%
7	Stasiun PSDKP Kupang	100	100	100%
8	Stasiun PSDKP Belawan	100	100	100%

Secara umum capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan pada IKU Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan Berbasis Manajemen Risiko Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%) lingkup Stasiun PSDKP Tarakan termasuk baik bila dibandingkan dengan UPT sejenis/setara dengan capaian tahunan sebesar 100%.

IKU 19 : Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (Indeks)

Profesionalitas ASN diukur berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, Profesionalitas ASN diukur berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin per masing-masing Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatannya;

Kualifikasi [Bobot 25%] yaitu yang berkenaan dengan tingkat pendidikan ASN sesuai SK Pangkat terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di-update pada aplikasi SIMPEG Online KKP dengan penilaian sebagai berikut:

- Pendidikan: S3 (Nilai 25); S2 (Nilai 20); S1 (Nilai 15); D3 (Nilai 10); DII/DI/SMA (Nilai 5); SMP/SD (Nilai 1)

- Kompetensi [Bobot 40%] yaitu yang berkenaan dengan keikutsertaan ASN dalam Diklatpim (bagi Pejabat Eselon) serta Diklat Fungsional, Diklat 20 JP, atau Seminar (Bagi ASN Non Eselon), dengan penilaian sebagai berikut:
 - Pejabat Struktural dihitung dgn komponen:
 - DIKLATPIM: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)
 - DIKLAT 20JP: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)
 - SEMINAR: Pernah ikut (Nilai 10), tidak pernah (nilai 0)
 - Pejabat Fungsional Tertentu dihitung dgn komponen:
 - DIKLAT Teknis/Fungsional: Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)
 - DIKLAT 20JP; Pernah ikut (Nilai 15), tidak pernah (nilai 0)
 - SEMINAR. Pernah ikut (Nilai 10), tidak pernah (nilai 0)
 - Pejabat Fungsional Umum/Staf dihitung dgn komponen:
 - DIKLAT 20 JP; Pernah ikut (Nilai 22,5), tidak pernah (nilai 0)
 - SEMINAR. Pernah ikut (Nilai 17,5), tidak pernah (nilai 0)
- Kinerja (Bobot 30%) yaitu berkenaan dengan hasil penilaian prestasi kerja ASN melalui aplikasi Penilaian Perstasi Kerja Online KKP yang dikolaborasikan dengan database kepegawaian (SIMPEG Online KKP), dengan penilaian sebagai berikut:
 - Nilai SKP 91 – Ke atas Nilai : 30 (Sangat Baik)
 - Nilai SKP 76 – 90 Nilai : 25 (Baik)
 - Nilai SKP 61 – 75 Nilai : 15 (Cukup)
 - Nilai SKP 51 – 60 Nilai : 5 (Kurang)
 - Nilai SKP 50 ke bawah Nilai : 1 *Buruk)
- Disiplin (Bobot 5%) yaitu berkenaan dengan pernah atau tidaknya ASN dijatuhi hukuman disiplin, dengan penilaian sebagai berikut:
 - Tidak Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Nilai 5;
 - Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Ringan Nilai 3
 - Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Sedang Nilai 2
 - Pernah Mendapatkan Hukuman Disiplin Berat Nilai 1

Tabel 47. Hasil Pengukuran IKU Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (Indeks)

INDIKATOR KINERJA	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Renstra 2020-2024
	T	R	T	R	T	R	T	R	T
Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (Indeks)	70	90	73	76,95	77	80,07	78	89,06	72

Berdasarkan tabel diatas Stasiun PSDKP Tarakan memperoleh capaian Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Tarakan dengan capaian nilai indeks 89,06 dan bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, Stasiun PSDKP Tarakan mampu meningkatkan capaian kinerjanya dengan peningkatan nilai indeks sebesar 8,99. Capaian kinerja tahun 2023 bila dibandingkan dengan rencana strategis 2020-2024 juga telah mencapai dan melebihi target dengan peningkatan nilai indeks sebesar 17,06. Hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian IKU tersebut yakni peningkatan kompetensi pegawai yang rutin dilaksanakan melalui bimbingan teknis, sosialisasi, maupun pendidikan dan pelatihan baik secara daring maupun luring sepanjang tahun 2023.

Tabel 48. Perbandingan Pencapaian IKU ke-19 dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2023

No.	UPT	Target 2023	Capaian2023	Persentase Capaian 2023
1	Stasiun PSDKP Ambon	78	91,07	116,76%
2	Stasiun PSDKP Pontianak	78	90,59	116,14%
3	Stasiun PSDKP Biak	78	89,79	115,12%
4	Stasiun PSDKP Tarakan	78	89,06	114,18%
5	Stasiun PSDKP Tahuna	78	88,34	113,26%
6	Stasiun PSDKP Cilacap	78	88,26	113,15%
7	Stasiun PSDKP Belawan	78	87,87	112,51%
8	Stasiun PSDKP Kupang	78	87,28	111,90%

Secara umum capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan pada IKU Indeks Profesionalitas ASN lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (Indeks) lingkup Stasiun PSDKP Tarakan termasuk baik bila dibandingkan dengan UPT sejenis/setara dengan capaian tahunan sebesar 114,18%.

IKU 20 : Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Tarakan (Nilai)

SAKIP adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Hasil penilaian oleh Inspektorat Mitra berdasarkan lembar kerja evaluasi yang disusun itjen dengan mengacu pada lembar kerja evaluasi AKIP oleh KEMENPAN RB.

Tabel 49. Hasil Pengukuran IKU Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Tarakan (Nilai)

INDIKATOR KINERJA	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Renstra 2020-2024
	T	R	T	R	T	R	T	R	T
Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Tarakan (Nilai)	-	-	-	-	-	-	80,50	80,30	-

Berdasarkan tabel diatas Stasiun PSDKP Tarakan memperoleh capaian Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Tarakan (Nilai) dengan capaian sebesar 80,30 atau capaian kinerja sebesar 99,75, capaian Stasiun PSDKP Tarakan tidak mencapai target dengan selisih nilai sebesar 0,2 dan tidak dapat dibandingkan dengan Capaian IKU tahun sebelumnya karena perbedaan indikator kinerja. IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan pada tahun anggaran 2023. Capaian kinerja tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan rencana strategis 2020-2024 karena perbedaan indikator. Kendala yang dihadapi yakni pengadministrasian data dukung terhadap penerapan SAKIP tidak optimal. Untuk mengantisipasi hal tersebut, telah dilakukan pendokumentasian secara rutin pada setiap agenda penerapan SAKIP untuk persiapan penilaian Tahun 2024.

Tabel 50. Perbandingan Pencapaian IKU ke-20 dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2023

No.	UPT	Target 2023	Capaian2023	Persentase Capaian 2023
1	Stasiun PSDKP Cilacap	80,50	89,70	111,43%
2	Stasiun PSDKP Tahuna	80,50	84,80	105,34%
3	Stasiun PSDKP Ambon	80,50	83,30	103,48%
4	Stasiun PSDKP Belawan	80,50	82,15	102,05%
5	Stasiun PSDKP Kupang	80,50	81,20	100,87%
6	Stasiun PSDKP Tarakan	80,50	80,30	99,75%
7	Stasiun PSDKP Pontianak	80,50	79,55	98,82%
8	Stasiun PSDKP Biak	80,50	78,80	97,89%

Secara umum capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan pada IKU Penilaian Mandiri SAKIP Stasiun PSDKP Tarakan (Nilai) lingkup Stasiun PSDKP Tarakan termasuk baik bila dibandingkan dengan UPT sejenis/setara dengan capaian tahunan sebesar 99,75%.

IKU 21 : Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)

Nilai implementasi program budaya kerja adalah indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Satker.

Nilai implementasi program budaya kerja diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Komite dan Tim Budaya Kerja Satker, menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja.

Unsur Budaya Kerja yang dinilai implementasinya terdiri dari:

1. Tim Satker (6)
2. Hasilkan Inovasi Unit Kerja (12)
3. Lima Menit Sebelum Jadwal (2)
4. Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin (2)
5. Upayakan Data Terkini (2)
6. Organisasikan, Catat, Aksi, dan Arsipkan (3)
7. Tegakan Aturan dengan Akuntabel dan Transparan (1)

8. Belanjakan Anggaran secara Realistis, Akuntabel dan Amanah (1)
9. ASN PSDKP Produktif Kerja (1)
10. Menyelesaikan Tugas dengan Tepat (3)
11. Hargai, Motivasi, dan Inisiatif (2)
12. Gelorakan Gerakan hemat Energi (3)

Tabel 51. Hasil Pengukuran IKU Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)

INDIKATOR KINERJA	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Renstra 2020-2024
	T	R	T	R	T	R	T	R	T
Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai)	-	-	-	-	21	26,85	21	20,34	-

Berdasarkan tabel diatas Stasiun PSDKP Tarakan memperoleh capaian Nilai Implementasi Program Budaya Kerja dengan nilai capaian sebesar 20,34 atau capaian kinerja sebesar 96,86%, capaian Stasiun PSDKP Tarakan tidak mencapai target dengan selisih nilai sebesar 0,66 dan bila dibandingkan dengan Capaian IKU tahun sebelumnya, Stasiun PSDKP Tarakan mengalami penurunan terhadap capaian kinerjanya dengan selisih nilai sebesar 6,51. Capaian kinerja tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan rencana strategis 2020-2024 karena perbedaan indikator. Secara umum kendala yang dihadapi pada proses pencapaian kinerja terkait IKU ini adalah Penerapan Budaya Kerja pada Stasiun PSDKP Tarakan belum optimal dengan tidak dilampirkannya bukti implementasi sehingga berdampak pada capaian. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka perlu dilakukan rapat rutin Tim Budaya Kerja sehingga implementasi Budaya Kerja dapat optimal.

Tabel 52. Perbandingan Pencapaian IKU ke-21 dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2023

No.	UPT	Target 2023	Capaian2023	Persentase Capaian 2023
1	Stasiun PSDKP Cilacap	21	27,84	120%
2	Stasiun PSDKP Biak	21	27,34	120%
3	Stasiun PSDKP Kupang	21	26,33	120%
4	Stasiun PSDKP Belawan	21	25,34	120%

No.	UPT	Target 2023	Capaian2023	Persentase Capaian 2023
5	Stasiun PSDKP Pontianak	21	24,85	118,33%
6	Stasiun PSDKP Ambon	21	23,19	110,43%
7	Stasiun PSDKP Tahuna	21	23,19	110,43%
8	Stasiun PSDKP Tarakan	21	20,34	96,86%

Secara umum capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan pada IKU Nilai Implementasi Program Budaya Kerja (Nilai) lingkup Stasiun PSDKP Tarakan termasuk baik bila dibandingkan dengan UPT sejenis/setara dengan capaian tahunan sebesar 96,86%.

IKU 22 : Inovasi yang diterapkan pada unit kerja Stasiun PSDKP Tarakan (inovasi)

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan publik baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinil dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada.

Untuk sementara, penetapan ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 50 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara.

Kriteria Inovasi: memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi, berkelanjutan. Kelompok inovasi: umum, khusus. Aspek penilaian Kelompok Umum: ringkasan (5%), ide inovatif (20%), Signifikansi (25%), Kontribusi terhadap capaian TPB (5%), Adaptabilitas (20%), keberlanjutan (20%), Kolaborasi pemangku kepentingan (5%). Aspek penilaian Kelompok Khusus: Pembaruan/Peningkatan inovasi (25%), Adapatabilitas (20%), Penguatan keberlanjutan (25%), Evaluasi (30%). Persyaratan inovasi: memenuhi seluruh kriteria inovasi; selaras dengan tema kompetisi; relevan dengan salah satu kategori kompetisi dan kelompok

inovasi, diajukan dalam bentuk proposal dan disertai dokumen pendukung; menggunakan judul yang menggambarkan inovasi dengan memperhatikan norma dan kepatasan.

Tabel 53. Hasil Pengukuran IKU Inovasi yang diterapkan pada unit kerja Stasiun PSDKP Tarakan (Inovasi)

INDIKATOR KINERJA	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Renstra 2020-2024
	T	R	T	R	T	R	T	R	T
Inovasi yang diterapkan pada unit kerja Stasiun PSDKP Tarakan (Inovasi)	-	-	-	-	-	-	1	1	-

Berdasarkan tabel diatas Stasiun PSDKP Tarakan memperoleh capaian Inovasi yang diterapkan pada unit kerja Stasiun PSDKP Tarakan sejumlah 1 atau dengan capaian kinerja sebesar 100% dan tidak dapat dibandingkan dengan Capaian IKU tahun sebelumnya karena perbedaan indikator kinerja. IKU tersebut merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan pada tahun anggaran 2023. Capaian kinerja tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan rencana strategis 2020-2024 karena perbedaan indikator. Hal yang menyebabkan keberhasilan dalam pencapaian IKU tersebut yakni dengan mengusulkan Inovasi baik oleh Tim GKT maupun secara individu, Tahun 2023, Stasiun PSDKP Tarakan telah mengusulkan 1 Inovasi oleh Tim GKT Stasiun PSDKP Tarakan dari target 1 Inovasi yang harus diusulkan sehingga Pencapaian Kinerja sebesar 100%, Inovasi yang diusulkan dengan judul "Database Rekapitulasi Pengawasan (DESIGN)" dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan hasil pengawasan SDKP.

Tabel 54. Perbandingan Pencapaian IKU ke-22 dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2023

No.	UPT	Target 2023	Capaian2023	Persentase Capaian 2023
1	Stasiun PSDKP Tarakan	1	1	100%
2	Stasiun PSDKP Biak	1	1	100%
3	Stasiun PSDKP Ambon	1	1	100%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	1	1	100%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	1	1	100%

No.	UPT	Target 2023	Capaian2023	Persentase Capaian 2023
6	Stasiun PSDKP Cilacap	1	1	100%
7	Stasiun PSDKP Kupang	1	1	100%
8	Stasiun PSDKP Belawan	1	1	100%

Secara umum capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan pada IKU Inovasi yang diterapkan pada unit kerja Stasiun PSDKP Tarakan (Inovasi) lingkup Stasiun PSDKP Tarakan termasuk baik bila dibandingkan dengan UPT sejenis/setara dengan capaian tahunan sebesar 100%.

IKU 23 : Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%)

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Unit Pelaksana Teknis yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV.

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2022;
- Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 Tahun 2022 baik ke pengguna barang dan pengelola barang;
- Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2019;
- Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2022 didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian;
- Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu.

Tabel 55. Hasil Pengukuran IKU Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%)

INDIKATOR KINERJA	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Renstra 2020-2024
	T	R	T	R	T	R	T	R	T
Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%)	-	-	72,5	95	75	100	77,50	100	-

Berdasarkan tabel diatas Stasiun PSDKP Tarakan memperoleh capaian Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Tarakan dengan capaian sebesar 100% atau capaian kinerja sebesar 120% dan bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, Stasiun PSDKP Tarakan mampu mempertahankan capaian kinerjanya. Capaian kinerja tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan rencana strategis 2020-2024 karena perbedaan indikator. Pengukuran/penilaian IKU ini dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal, Capaian kinerja untuk IKU ini bila dibandingkan dengan capaian Tahun lalu terdapat peningkatan sebesar 5%. Hal ini ditunjang oleh Pengelolaan BMN Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yang optimal dengan meningkatkan kualitas pengelolaan BMN berdasarkan kekurangan tahun 2022.

Tabel 56. Perbandingan Pencapaian IKU ke-23 dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2023

No.	UPT	Target 2023	Capaian 2023	Persentase Capaian 2023
1	Stasiun PSDKP Tarakan	77,50	100	120%
2	Stasiun PSDKP Biak	77,50	100	120%
3	Stasiun PSDKP Ambon	77,50	100	120%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	77,50	100	120%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	77,50	100	120%
6	Stasiun PSDKP Cilacap	77,50	100	120%
7	Stasiun PSDKP Kupang	77,50	100	120%
8	Stasiun PSDKP Belawan	77,50	100	120%

Secara umum capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan pada IKU Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%) lingkup Stasiun PSDKP Tarakan termasuk baik bila dibandingkan dengan UPT sejenis/setara dengan capaian tahunan sebesar 120%.

IKU 24 : Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%)

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan BMN lingkup Unit Pelaksana Teknis yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengukuran/penilaian dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal pada Triwulan IV.

Tingkat kepatuhan pengelolaan BMN Unit Eselon I diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

- Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2022;
- Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga triwulan 4 Tahun 2022 baik ke pengguna barang dan pengelola barang;
- Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2017-2019;
- Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2022 didukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian;
- Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu.

Tabel 57. Hasil Pengukuran IKU Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%)

INDIKATOR KINERJA	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Renstra 2020-2024
	T	R	T	R	T	R	T	R	T
Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%)	-	-	72,5	93,39	75	100	77,5	95,94	-

Berdasarkan tabel diatas Stasiun PSDKP Tarakan memperoleh capaian Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Stasiun PSDKP Taraka dengan capaian sebesar 95,94% atau capaian kinerja sebesar 120% dan bila dibandingkan dengan

capaian tahun sebelumnya, Stasiun PSDKP Tarakan mengalami penurunan capaian kinerjanya sebesar 4,06%. Capaian kinerja tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan rencana strategis 2020-2024 karena perbedaan indikator. Hal ini ditunjang oleh Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yang optimal dengan meningkatkan kualitas dokumen Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan kekurangan tahun 2022.

Tabel 58. Perbandingan Pencapaian IKU ke-24 dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2023

No.	UPT	Target 2023	Capaian2023	Persentase Capaian 2023
1	Stasiun PSDKP Ambon	77,50	100	120%
2	Stasiun PSDKP Pontianak	77,50	100	120%
3	Stasiun PSDKP Biak	77,50	98,75	120%
4	Stasiun PSDKP Tarakan	77,50	95,94	120%
5	Stasiun PSDKP Kupang	77,50	95,04	120%
6	Stasiun PSDKP Belawan	77,50	95,04	120%
7	Stasiun PSDKP Tahuna	77,50	94,64	120%
8	Stasiun PSDKP Cilacap	77,50	86,40	110,19%

Secara umum capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan pada IKU Tingkat kepatuhan pengadaan barang/jasa Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%) lingkup Stasiun PSDKP Tarakan termasuk baik bila dibandingkan dengan UPT sejenis/setara dengan capaian tahunan sebesar 120%.

IKU 25 : Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%)

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah maupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Terdapat 3 Komponen yang dijadikan sebagai tolak ukur, yaitu:

- a. Dokumen: Renstra 2020-2024, Perjanjian Kinerja, Informasi Indikator Kinerja, Laporan Kinerja & Interim, Rencana Kerja RB, Renaksi Kinerja;
- b. Keikutsertaan: Pimpinan Unit Eselon I-IV, Staf (minimal 2 orang per Unit Eselon IV);
- c. Keaktifan: Pimpinan Unit Eselon I-Staf

Adapun cara untuk melakukan pengukuran IKU Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yakni:

- a. Menggunakan Aplikasi Bitrix
- b. Pengukuran dilakukan setiap triwulan dengan target yang telah ditetapkan
- c. Pengukuran dokumen: Perjanjian Kinerja dilakukan setiap tahun, Laporan Kinerja dilakukan setiap triwulan, Renaksi Kinerja
- d. Keikutsertaan akan direkap setiap hari dalam satu triwulan,
- e. Penghitungan Keaktifan dilakukan setiap hari dalam satu triwulan dengan komposisi minimal 6 (enam) kali upload informasi,
- f. Untuk konten video diharapkan bersifat edukasi atau ajakan, yang di upload minimal satu kali dalam triwulan,
- g. Rekonsiliasi realisasi dengan mengundang penanggung jawab eselon I dilakukan setiap triwulan,
- h. Pengukuran level 1 dihitung dengan lingkup pejabat pusat,
- i. Pusdatin menyediakan data hasil rekap pejabat yang telah aktif pada setiap triwulan untuk diolah dan dijadikan nilai IKU MP masing-masing unit kerja eselon I,
- j. Hasil capaian pada akhir tahun merupakan nilai rata-rata capaian pada triwulan I-IV.

Tabel 59. Hasil Pengukuran IKU Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%)

INDIKATOR KINERJA	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Renstra 2020-2024
	T	R	T	R	T	R	T	R	T
Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%)	82	82	84	93,86	86	84,44	92	75,11	82

Berdasarkan tabel diatas Stasiun PSDKP Tarakan memperoleh capaian Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan dengan capaian 75,11% atau capaian kinerja sebesar 81,64%. Atas hal tersebut, capaian kinerja Tahun 2023 tidak mencapai target Tahunan dengan selisih 16,89% dan juga tidak mencapai target kinerja rencana strategis 2020-2024 dengan selisih capaian sebesar 6,89%. Hal tersebut dikarenakan Pimpinan dan Ketua Tim Kerja lingkup Stasiun PSDKP Tarakan tidak melaporkan kegiatan rutinnya pada aplikasi collaboration office sehingga capaian tahunan tidak mencapai target. Sebagai langkah perbaikan, untuk tahun 2024 telah dilakukan penugasan khusus kepada salah satu pegawai terkait pengelolaan aplikasi collaboration office dan akan dilakukan pemberitahuan secara rutin untuk melaporkan kegiatan.

Tabel 60. Perbandingan Pencapaian IKU ke-25 dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2023

No.	UPT	Target 2023	Capaian2023	Persentase Capaian 2023
1	Stasiun PSDKP Kupang	92	133,33	120%
2	Stasiun PSDKP Belawan	92	123,33	120%
3	Stasiun PSDKP Ambon	92	121,67	120%
4	Stasiun PSDKP Tahuna	92	120	120%
5	Stasiun PSDKP Cilacap	92	108,33	117,75%
6	Stasiun PSDKP Biak	92	100	108,70%
7	Stasiun PSDKP Pontianak	92	85	92,39%
8	Stasiun PSDKP Tarakan	92	75,11	81,64%

Secara umum capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan pada IKU Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (%) lingkup Stasiun PSDKP Tarakan termasuk rendah bila dibandingkan dengan UPT sejenis/setara dengan capaian tahunan sebesar 81,64%.

IKU 26 : Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)

Pengukuran capaian IKU ini dilakukan tiap Triwulan pertahunnya. Capaian IKU diperoleh berdasarkan jumlah dokumen hasil rekomendasi pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Sekretariat Ditjen PSDKP berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada periode 1 Oktober 2022 s/d 30 September 2023 (Triwulan IV Tahun 2022 s/d Triwulan III Tahun 2023) yang telah dilengkapi dan disampaikan kepada Inspektorat Jenderal KKP.

Tabel 61. Hasil Pengukuran IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)

INDIKATOR KINERJA	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Renstra 2020-2024
	T	R	T	R	T	R	T	R	T
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%)	-	-	-	-	70	100	100	100	-

Berdasarkan tabel diatas Stasiun PSDKP Tarakan memperoleh capaian Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%) dengan capaian 100% atau capaian kinerja sebesar 100% dan bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, Stasiun PSDKP Tarakan mampu mempertahankan capaian kerjanya. Capaian kinerja tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan rencana strategis 2020-2024 karena perbedaan indikator. Stasiun PSDKP Tarakan pada Tahun 2023 memiliki rekomendasi hasil pengawasan sebanyak 5 rekomendasi dan telah ditindaklanjuti dengan persentase penyelesaian 100% telah mencapai target Tahun 2023 sebesar 100% sehingga Pencapaian Kinerja sebesar 100%, Hal ini didukung oleh kinerja Pegawai Lingkup Stasiun

PSDKP Tarakan dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan oleh Inspektorat Jenderal KKP yang dimanfaatkan untuk perbaikan Kinerja Unit.

Tabel 62. Perbandingan Pencapaian IKU ke-26 dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2023

No.	UPT	Target 2023	Capaian2023	Persentase Capaian 2023
1	Stasiun PSDKP Tarakan	75	100	120%
2	Stasiun PSDKP Ambon	75	100	120%
3	Stasiun PSDKP Cilacap	75	100	120%
4	Stasiun PSDKP Kupang	75	100	120%
5	Stasiun PSDKP Belawan	75	100	120%
6	Stasiun PSDKP Biak	75	75	100%
7	Stasiun PSDKP Tahuna	75	75	100%
8	Stasiun PSDKP Pontianak	75	75	100%

Secara umum capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan pada IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (%) lingkup Stasiun PSDKP Tarakan termasuk baik bila dibandingkan dengan UPT sejenis/setara dengan capaian tahunan sebesar 100%.

IKU 27 : Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (nilai)

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Target IKPA Tahun 2023 sebesar 89.00 (nilai)

Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), antara lain

- a. Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- b. Baik, apabila $89 \leq$ nilai IKPA > 95 ;
- c. Cukup, apabila $70 \leq$ nilai IKPA < 89 ; atau
- d. Kurang, apabila nilai IKPA > 70

Tabel 63. Hasil Pengukuran IKU Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (nilai)

INDIKATOR KINERJA	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Renstra 2020-2024
	T	R	T	R	T	R	T	R	T
Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (nilai)	88	95	88	96,70	89	96,08	93,75	93,24	88

Berdasarkan tabel diatas Stasiun PSDKP Tarakan memperoleh capaian Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan dengan nilai capaian sebesar 93,24 atau capaian kinerja sebesar 99,46. Capaian tahun 2023 tidak mencapai target yakni 93,74 dengan selisih capaian sebesar 0,51. Bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, Stasiun PSDKP Tarakan mengalami penurunan capaian kinerjanya dengan selisih sebesar 2,84. Capaian kinerja tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan rencana strategis 2020-2024 karena perbedaan indikator. Secara umum, kendala yang dialami pada IKU ini adalah SDM yang dimiliki Stasiun PSDKP Tarakan yang menangani keuangan merangkap sebagai Pejabat Fungsional Pengawas Perikanan, Perlunya SDM Stasiun PSDKP Tarakan yang berlatar belakang administrasi/keuangan. Berdasarkan Analisis Beban Kerja di Stasiun PSDKP Tarakan belum efisien, karena masih kurang SDM tersebut untuk mengelola keuangan.

Tabel 64. Perbandingan Pencapaian IKU ke-27 dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2023

No.	UPT	Target 2023	Capaian 2023	Persentase Capaian 2023
1	Stasiun PSDKP Kupang	93,75	97,14	103,62%
2	Stasiun PSDKP Tahuna	93,75	96,36	102,78%
3	Stasiun PSDKP Cilacap	93,75	94,89	101,22%

No.	UPT	Target 2023	Capaian2023	Persentase Capaian 2023
4	Stasiun PSDKP Biak	93,75	94,73	101,05%
5	Stasiun PSDKP Tarakan	93,75	93,24	99,46%
6	Stasiun PSDKP Belawan	93,75	92,67	98,85%
7	Stasiun PSDKP Pontianak	93,75	92,45	98,61%
8	Stasiun PSDKP Ambon	93,75	92,42	98,58%

Secara umum capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan pada IKU Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (nilai) lingkup Stasiun PSDKP Tarakan termasuk baik bila dibandingkan dengan UPT sejenis/setara dengan capaian tahunan sebesar 99,46%.

IKU 28 : Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (nilai)

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks.

Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya.

Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian / Lembaga.

Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah

Tabel 65. Hasil Pengukuran IKU Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (nilai)

INDIKATOR KINERJA	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Renstra 2020-2024
	T	R	T	R	T	R	T	R	T
Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (nilai)	-	-	86	95,82	81	92,93	82	85,87	-

Berdasarkan tabel diatas Stasiun PSDKP Tarakan memperoleh capaian Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan dengan nilai capaian sebesar 85,87 atau capaian kinerja sebesar 104,72% dan bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, Stasiun PSDKP Tarakan mengalami penurunan capaian kerjanya sengan selisih capaian sebesar 7,06. Capaian kinerja tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan rencana strategis 2020-2024 karena perbedaan indikator. Capaian tersebut didukung oleh data yang peroleh melalui aplikasi SMART periode tanggal 10 Januari 2024 Stasiun PSDKP Tarakan memperoleh nilai NKA dengan uraian a), Penyerapan anggaran 99,62, b) Konsistensi 99,66, c) Capaian Keluaran 100,00 dan d) nilai Efisiensi 50,94. Hal ini disebabkan karena selisih penyerapan anggaran terhadap dokumen RPD sehingga nilai Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan rendah.

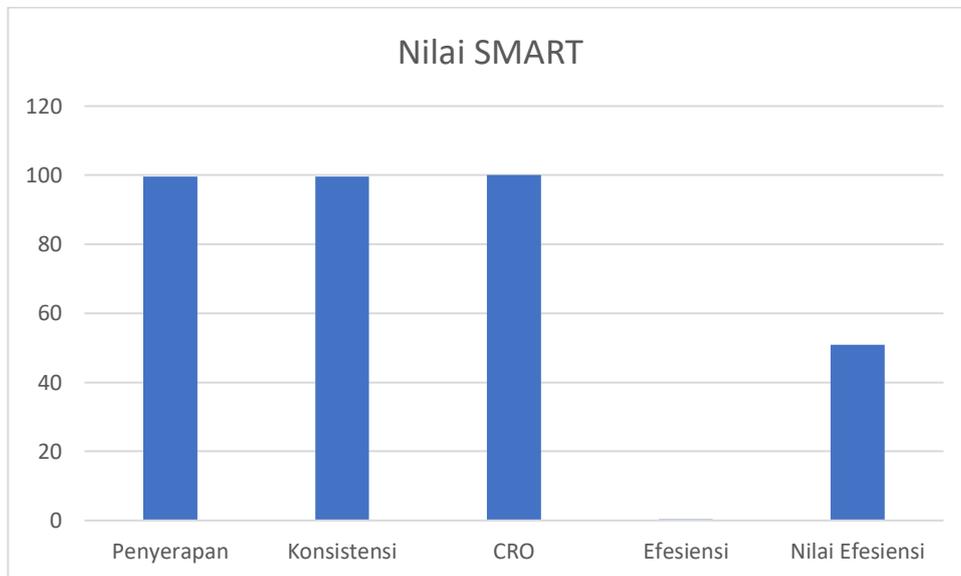
Tabel 66. Perbandingan Pencapaian IKU ke-28 dengan organisasi sejenis/setara Tahun 2023

No.	UPT	Target 2023	Capaian2023	Persentase Capaian 2023
1	Stasiun PSDKP Tahuna	82	88,61	108,06%
2	Stasiun PSDKP Ambon	82	87,67	106,91%
3	Stasiun PSDKP Belawan	82	86,2	105,12%
4	Stasiun PSDKP Cilacap	82	85,93	104,79%
5	Stasiun PSDKP Pontianak	82	85,92	104,78%
6	Stasiun PSDKP Tarakan	82	85,87	104,72%
7	Stasiun PSDKP Biak	82	85,83	104,67%
8	Stasiun PSDKP Kupang	82	84,65	103,22%

Secara umum capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan pada IKU Nilai kinerja anggaran (NKA) Lingkup Stasiun PSDKP Tarakan (nilai) lingkup Stasiun PSDKP Tarakan termasuk baik bila dibandingkan dengan UPT sejenis/setara dengan capaian tahunan sebesar 104,72%.

C. Efisiensi

Penghitungan efisiensi mengacu pada peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 tahun 2021 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran atas pelaksanaan rencana dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi keluaran anggaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Pada Tahun Anggaran 2023, efisiensi penggunaan sumber daya khususnya anggaran Ditjen PSDKP sebesar 0,38 yang disajikan oleh aplikasi SMART.



Gambar 7. Nilai capaian SMART Tahun 2023

E. Akuntabilitas Anggaran

Stasiun PSDKP Tarakan pada Tahun Anggaran 2023 memperoleh pagu anggaran sebesar Rp. 25,680,302,000,- (Dua Puluh Lima Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Juta Tiga Ratus Dua Ribu Rupiah) terbagi atas 3 (tiga) jenis belanja, yaitu Belanja Pegawai (51) dengan Anggaran sebesar Rp. 5,188,236,000,- (Lima Miliar Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah), untuk Belanja Barang (52) sebesar Rp. 15,538,563,000,- (Lima Belas Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah), dan Belanja Modal (53) sebesar Rp. 4,953,503,000,- (Empat Miliar Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tiga Ribu Rupiah). Realisasi penyerapan anggaran pada Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 25,583,370,144,- dengan persentase sebesar 99.62% (melebihi target minimal realisasi anggaran Ditjen PSDKP yaitu 99.45%). Kendala umum dalam upaya penyerapan anggaran pada tahun 2023 disebabkan beberapa hal yaitu;

1. Terdapat pergeseran jadwal pelaksanaan pengadaan speedboat pengawas, docking kapal pengawas, serta kegiatan operasional dan pengadaan lainnya yang masih sementara berproses pada TW III 2023 tetapi mengalami kendala yang menyebabkan bergesernya jadwal kegiatan dan pengadaan tersebut;
2. Pelaksanaan kegiatan pengawasan yang tidak sesuai rencana awal karena keterbatasan SDM Pengawas perikanan dan Polsus PWP3K.

Realisasi Anggaran Stasiun PSDKP Tarakan dapat dirincikan pada tabel berikut :

Tabel 67. Rincian Penyerapan Anggaran per Kegiatan Stasiun Pengawasan SDKP Tarakan periode Januari – Desember 2023 (TW I – TW IV 2023)

Kegiatan		Pagu (Rp.)	Total Realisasi s/d Bulan Desember 2023 (Rp.)	Persentase terhadap Pagu	Sisa Pagu (Rp.)
2350	Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan	14,543,037,000,-	14,523,881,013,-	99.87%	19,155,987,-
2351	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	320,800,000,-	319,795,368,-	99.69%	1,004,632,-
2352	Pengawasan Pengelolaan	798,240,000,-	796,385,822,-	99.77%	1,854,178,-

Kegiatan		Pagu (Rp.)	Total Realisasi s/d Bulan Desember 2023 (Rp.)	Persentase terhadap Pagu	Sisa Pagu (Rp.)
	Sumber Daya Kelautan				
2353	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	250,000,000,-	249,545,860,-	99.82%	454,140,-
2355	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen PSDKP	9,768,225,000,-	9,693,762,081,-	99.24%	74,462,919,-
TOTAL		25,680,302,000,-	25,583,370,144,-	99.62%	96,931,856,-

Bab IV

Penutup

A. Kesimpulan

Secara keseluruhan capaian kinerja Stasiun PSDKP Tarakan Tahun 2023 sudah baik dengan pencapaian sebesar 108,43% dengan predikat "Baik". Terdapat 15 (lima belas) IKU/IKM yang telah dilaksanakan dan melampaui target tahun 2023 dengan predikat istimewa (berwarna biru), 12 (dua belas) IKU/IKM yang telah dilaksanakan dan mencapai target tahun 2023 dengan predikat baik (berwarna hijau) serta terdapat 1 (satu) IKU/IKM yang telah dilaksanakan namun tidak mencapai target tahun 2023 dan hanya memperoleh predikat cukup (berwarna kuning).

B. Tindak Lanjut Sebelumnya

Tindak lanjut rekomendasi sebelumnya yakni:

1. Telah dilakukan pendampingan terhadap pelaku usaha dalam pengisian survey kepuasan masyarakat pada aplikasi e-Susan.
2. Telah dilakukan rapat bulanan rapat monitoring evaluasi pelaksanaan pengawasan SDKP.

C. Rencana Tindak Lanjut

Selama pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023 di Stasiun PSDKP Tarakan ditemukan kendala dan permasalahan dalam pencapaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Tahun 2023 sehingga direncanakan tindak lanjut perbaikan sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi ke Dit. PPSDP dan Dit. PPSDK guna validasi data pelaku usaha yang akan dilakukan pengawasan pada Tahun 2024
2. Melakukan penyampaian secara rutin melalui grup Whatsapp terkait pelaporan hasil kegiatan rutin pada aplikasi collaboration office.

